



**Respon Gen Z di Media Sosial Instagram terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait dengan Persyaratan Capres/Cawapres mengenai Batasan
Usia Capres/Cawapres 2024**

Proposal Skripsi

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun :

Nama : Zafira Zahra Yusyifa

NIM : 14010121140142

Dosen Pembimbing :

Dr. Laila Kholid Alfirdaus. S.IP., M.PP.

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama lengkap : Zafira Zahra Yusyifa
NIM : 14010121140142
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Tempat / Tanggal Lahir : Blora, 28 Agustus 2003
Jurusan / Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Gunung Lawu I No 49 Tempelan, Blora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis berjudul :

(Respon Gen Z di Media Sosial Instagram terhadap Keputusan MK tentang Batasan Usia Capres/Cawapres 2024)

Merupakan Hasil Karya Tulisan Saya sendiri, Tidak dari Hasil Karya Ilmiah Orang Lain. Apabila akan Menemukan Plagiatisasi dari hasil karya tulis orang lain berupa persamaan dokumen serta bentuk kecurangan dari penulis, Penulis akan sanggup menerima sanksi berupa pencabutan penulisan skripsi sehingga tidak dapat memenuhi Program Sarjana yang telah ditentukan sebagai bagian dari sidang akhir serta pencabutan nama gelar yang telah diberikan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 7 November 2024

Pembuat Pernyataan



Zafira Zahra Yusyifa

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Respon Gen Z di Media Sosial Instagram terhadap
Keputusan MK tentang Batasan Usia Capres/Cawapres 2024

Nama : Zafira Zahra Yusyifa

NIM : 14010121140142

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Departemen : Politik dan Pemerintahan

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1
Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin

NIP. 196908221994031003

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin

NIP. 196908221994031003

Dosen Pembimbing :

Dr. Laila Kholid Alfirdaus. S.IP., M.PP.

(.....)

Dosen Penguji :

1. Dr. Laila Kholid Alfirdaus. S.IP., M.PP.

(.....)

2. Wijayanto, S. IP, M. Si, Ph. D

(.....)

3. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, S.H, M.Si

(.....)

MOTTO

" Dream it as high as the skies. Because if you are fell, you're gonna fell among of the stars." – Soekarno

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." – Mahatma Gandhi

"Man shabara zhafira"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini sebagai amal baktiku kepada : Orang tuaku untuk Ayah dan Mamah yang bekerja mati-matian untuk anaknya, terimakasih telah baik terhadap anak perempuanmu, selalu diperhatikan setiap langkah dan selalu memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya serta saya sebagai anak tunggal di berikan pengajaran yang baik untuk tetap tegar dalam segala kondisi serta di berikan Pendidikan layak hingga Sarjana. Terimakasih untuk selalu mendoakan saya di setiap langkah di berikan motivasi serta kesabaran membimbing saya hingga menjalankan skripsi dengan sempurna karena doa mereka,

Terima kasih untuk diriku yang kuat melawan badai, Tetap Ikhlas menerima cobaan serta keyakinan dalam diri sampai bisa saat ini, saya yakin dirimu kuat dirimu hebat, dirimu tabah dalam menjalankan segala cobaan dan terutamanya tidak pantang menyerah karena sejatinya seseorang itu terjatuh terbentur serta terbentuk. Ini bukan akhir dari segalanya namun ini adalah langkah awal pembuka menuju kesuksesanmu.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami respon Generasi Z (Gen Z) di media sosial Instagram terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) pada Pemilu 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis terhadap konten serta interaksi di platform Instagram, penelitian ini menemukan bahwa Gen Z menunjukkan pandangan yang beragam terkait putusan tersebut. Sebagian besar Gen Z menyuarakan ketidaksetujuan terhadap batasan usia minimal 40 tahun, yang dinilai menghambat partisipasi generasi muda dalam politik. Sebaliknya, sebagian lainnya mendukung keputusan tersebut dengan alasan pentingnya kematangan usia dalam memimpin negara.

Faktor-faktor yang memengaruhi respon Gen Z mencakup akses terhadap informasi digital, pengaruh tokoh publik dan influencer, serta nilai-nilai politik yang dianut oleh mereka. Gen Z memanfaatkan Instagram tidak hanya sebagai konsumen informasi tetapi juga sebagai produsen opini, dengan menyampaikan pandangan melalui konten kreatif seperti meme, infografis, dan video. Jaringan sosial di Instagram berperan penting dalam membentuk sikap politik, memperkuat identitas politik, dan menciptakan ruang diskusi yang dinamis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sikap digital Gen Z, yang mencakup kemampuan untuk mengakses, menyaring, dan menyebarkan informasi, sangat memengaruhi cara mereka merespons keputusan MK. Instagram menjadi platform utama bagi Gen Z untuk mengekspresikan pendapat mereka secara kritis terhadap keputusan yang dianggap membatasi peluang politik generasi muda.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial berperan dalam membentuk opini politik di kalangan Gen Z. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik generasi muda serta menjadi acuan bagi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi politik mereka.

Kata Kunci: Respon Gen Z, Instagram, Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Capres/Cawapres, Partisipasi Politik.

ABSTRACT

This research aims to explore and understand the response of Generation Z (Gen Z) on Instagram social media to the decision of the Constitutional Court (MK) regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates (capres/cawapres) in the 2024 Election. Using a qualitative approach and analysis of content and interactions on the Instagram platform, this research found that Gen Z showed mixed views regarding the ruling. Most of Gen Z voiced their disapproval of the minimum age limit of 40 years, which is considered to hinder the younger generation's participation in politics. On the other hand, others supported this decision on the grounds of the importance of age maturity in leading the country.

Factors that influence Gen Z's response include access to digital information, the influence of public figures and influencers, and the political values they adhere to. Gen Z utilizes Instagram not only as consumers of information but also as producers of opinion, by conveying their views through creative content such as memes, infographics and videos. The social network on Instagram plays an important role in shaping political attitudes, strengthening political identities, and creating dynamic discussion spaces.

This research also found that Gen Z's digital attitudes, which include the ability to access, filter and disseminate information, greatly influence how they respond to MK decisions. Instagram has become the main platform for Gen Z to express their opinions critically regarding decisions that are considered to limit the political opportunities of the younger generation.

The results of this research provide insight into how social media plays a role in shaping political opinions among Gen Z. It is hoped that these findings can become a reference for understanding the influence of social media on the political participation of the younger generation and become a reference for policies that are more inclusive and responsive to their political aspirations.

Keywords: Generation Z Response, Instagram, Constitutional Court, Age Limit, Presidential/Vice-Presidential Candidates, Political Participation.

KATA PENGANTAR

Alhamduillahirrobilalamin, Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **(Respon Gen Z di Media Sosial Instagram terhadap Keputusan MK tentang Batasan Usia Capres/Cawapres 2024)**. Tepat Waktu dengan penuh keyakinan serta kerja keras. Skripsi ini di susun untuk Syarat sebagai Kelulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, motivasi, bimbingan serta nasehat diberbagai pihak selama Skripsi ini berjalan hingga terselesaikan dengan sempurna serta Penulis mengucapkan banyak- banyak Terimakasih Kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan kepada penulis hingga mempermudah penulis agar dapat menjalankan skripsi dengan kelancaran.
2. Orang Tua Penulis yang selalu memberikan Doa serta memotivasi Penulis agar dapat berjuang tanpa mengenal lelah sebelum medan perang menang.
3. Prof. Dr. Suharnomo, SE., M.Si, Selaku Rektor Universitas Diponegoro
4. DR. Drs. Teguh Yuwono elaku Dekan serta Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
5. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H, M.Si. Selaku Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Dr. Nunik Retno Herawati S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Dr. Laila Kholid Alfirdaus. S.IP., M.PP. Selaku Dosen Pembimbing Pertama saya yang membimbing serta memberikan ilmu hingga mendampingi saya hingga akhir. Terimakasih Ibu telah baik kepada saya serta penuh dengan sabar mendampingi saya merangkai serta memberikan arahan kepada saya sehingga sampai di titik puncak akhir menyusun Skripsi.
8. Wijayanto, S. IP, M. Si, Ph. D dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, S.H, M.Si Selaku Dosen Penguji Saya yang telah memberikan arahan, masukan serta

motivasi kepada saya sehingga memberikan hasil yang semaksimal mungkin, Terimakasih mas Wija dan Pak NHS telah memberikan arahan sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.

9. Sahabat tercinta Rosiana, terima kasih selalu ada di setiap langkah perjalanan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi sumber semangat dan penghiburan di saat-saat penuh tekanan, menghadirkan canda tawa yang membuat proses yang berat ini terasa lebih ringan. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kesabaranmu dalam mendengarkan keluh kesah serta dorongan untuk terus maju. Persahabatan kita bukan hanya membantuku melewati masa-masa sulit, tetapi juga mengingatkanku akan arti kebersamaan yang tulus. Aku merasa sangat beruntung memilikimu dalam hidupku mesmew.
10. Pasangan saya Enggar adi, terimakasih sayang sudah memberikan dukungan, kesabaran, dan semangat tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kehadiranmu dan doronganmu, pencapaian ini mungkin tidak akan terwujud dengan baik. Setiap waktu yang kita habiskan bersama, baik untuk bersantai maupun berbicara ringan, selalu menjadi pelipur lara di tengah-tengah kesibukan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semangat, kesabaran, dan perhatian yang tiada henti, yang membuat saya merasa didukung dan termotivasi untuk terus maju. Kehadiranmu adalah salah satu kekuatan terbesar yang membantu saya melewati berbagai tantangan, dan aku sangat bersyukur atas semua yang telah kita lalui bersama.
11. Saffana dan Zakiya terima kasih yang tulus kepada kalian saudara sepupuku, yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu di setiap langkah perjalanan akademik ku, baik dalam bentuk dukungan moral maupun bantuan praktis, memberikan kekuatan dan motivasi yang berarti. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang kalian berikan, serta canda tawa yang membuat proses ini terasa lebih ringan. Dukunganmu membuatku merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini, dan untuk itu, aku merasa sangat

bersyukur memiliki sepupu sepertimu dalam hidupku, love you sambang n sakiy.

12. Puput, Niken, dan Shayla terimakasih yang mendalam kepada teman-teman SMA ku, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup ku hingga sampai pada penyusunan skripsi ini. Meskipun kita kini berjalan di jalan yang berbeda, kenangan kebersamaan kita selama masa sekolah, tawa, dan dukungan kalian tetap menjadi sumber semangat dan motivasi yang besar. Terima kasih atas persahabatan yang selalu memberikan kebahagiaan dan kekuatan, serta untuk setiap dukungan moral yang selalu ada di saat ku membutuhkan semangat.
13. Caca, Juan, dan Almh. Mute terima kasih yang tulus kepada teman-teman hangout ku, yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan di tengah kesibukan akademik ku. Setiap momen bersama kalian, baik itu sekadar bersantai, berbicara santai, atau bercanda, selalu menjadi penyegar di tengah perjalanan panjang penyusunan skripsi ini.
14. Amara, Faradila, Muti, dan Nadhila terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat kuliah saya, yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian membuat setiap tantangan akademik terasa lebih ringan dan setiap momen menjadi lebih bermakna. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan dalam mengerjakan tugas, serta motivasi yang selalu kalian berikan, terutama saat semangat saya mulai goyah.
15. Yangti, Yangkung, Mbahyi, dan Mbahkung dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, aku ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kakek dan nenek tercinta. Dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap nasihat dan semangat dari kalian selalu mengingatkan ku untuk terus berjuang, tidak hanya untuk meraih cita-cita, tetapi juga untuk menghargai setiap proses yang saya jalani.
16. Untuk para Koordes dan Jonathan, Fayi, Gustin, Elita, Shayna, Tiara, Raihan, dan Naufal terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman KKN yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan akademik

saya, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan kita selama KKN tidak hanya memberikan pengalaman berharga dalam bekerja bersama masyarakat, tetapi juga menciptakan ikatan yang penuh dukungan dan semangat. Terima kasih atas kerja sama, canda tawa, dan dukungan yang kalian berikan, yang memberikan inspirasi dan semangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Momen-momen kebersamaan kita akan selalu saya kenang dengan penuh rasa syukur dan hangat dalam hati.

17. Safea, Salma, Machiko, dan Friskila terima kasih kepada adik sepupuku tersayang, meski masih kecil, telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat di tengah proses penyusunan skripsi ini. Senyum, tawa, dan keceriaanmu selalu berhasil menghapus kelelahan dan memberi energi baru di setiap waktu. Terima kasih telah menjadi cahaya kecil yang menginspirasi dan mengingatkan saya akan pentingnya semangat dan kesederhanaan dalam menghadapi segala tantangan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Segala dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi saya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik bagi dunia akademik maupun masyarakat. Dengan segala kerendahan hati, saya berharap skripsi ini dapat menjadi karya yang bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk terus belajar dan berkembang.

Semarang, 7 November 2024

Penulis



Zafira Zahra Yusyifa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.5. Penelitian Terdahulu	7
1.6. Kerangka Teori	9
1.6.1. Demokrasi Digital	9
1.6.2. Anak Muda dan Politik: Antara Kesempatan dan Privilege	12
1.6.3. Partisipasi Politik	15
1.6.4. Kewarganegaraan Digital (Digital Citizenship)	19
1.7. Metode Penelitian.....	21
1.7.1. Desain penelitian	21
1.7.2. Situs Penelitian	22
1.7.3. Subjek/Objek Penelitian.....	22
1.7.4. Jenis atau Sumber Data	22
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	23
1.7.6. Teknik Analisis Data	23
BAB II GAMBARAN UMUM PROFIL AKUN INSTAGRAM DAN DINAMIKA GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL	25
2.1. Gambaran Umum Akun Instagram	25
2.1.1. Profil Akun Mahkamah Konstitusi.....	26
2.1.2. Profil Akun Instagram Narasi Newsroom.....	27

2.1.3. Profil Akun Instagram Kumparan	28
2.2 Gambaran Umum dan Dinamika Generasi Z di Media Sosial	29
2.2.1.1. Generasi Z sebagai pengguna aktif media sosial	29
2.2.1.2. Respon Gen Z terhadap Isu Politik di Media Sosial	30
BAB III RESPON GEN Z DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN MK TENTANG BATASAN USIA CAPRES/CAWAPRES 2024.	
Respon Positif Gen Z terhadap Keputusan MK.....	40
Respon Negatif dan Kekhawatiran tentang Keputusan MK	42
3.1.1. Percakapan Gen Z di Akun Instagram Mahkamah Konstitusi	43
3.1.2. Percakapan Gen Z di Akun Instagram Narasi Newsroom	46
3.1.3. Percakapan Gen Z di Akun Instagram Kumparancom.....	49
3.2. Faktor yang memengaruhi pendapat Gen Z di Media Sosial Instagram Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres/Cawapres	51
3.2.1. Pendidikan dan Literasi Digital	53
3.2.2. Pengaruh Media Sosial dan Jaringan Sosial	54
3.2.3. Pengaruh Nilai dan Aspirasi Politik	57
3.2.4. Pengaruh Tokoh Publik dan Influencer	60
3.3. Pengaruh sikap digital Gen Z di Media Sosial Instagram terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres/Cawapres	Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Partisipasi Aktif dalam Diskusi Politik	Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Penggunaan Konten Kreatif untuk Mempengaruhi Opini	Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Respon Cepat terhadap Berita dan Perkembangan Politik	Error! Bookmark not defined.
BAB IV REFLEKSI TEMUAN	63
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Generasi Z, yang terdiri dari individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh dalam era digital yang penuh dengan akses informasi melalui internet dan media sosial. Kehadiran teknologi telah memengaruhi cara mereka berkomunikasi, berpikir, dan membentuk pandangan politik. Perkembangan teknologi dan internet yang pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Generasi Z, yang tumbuh dalam era digital, merupakan kelompok yang sangat terhubung dengan teknologi, khususnya melalui platform media sosial.

Salah satu peristiwa penting dalam ranah politik di Indonesia adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan umur calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan aturan-aturan politik, termasuk batasan umur calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Pada Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, di Ruang Sidang Pleno MK, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan terkait batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Keputusan ini dapat mempengaruhi cara Generasi Z memandang demokrasi dan proses politik di Indonesia. Sikap digital Generasi Z terhadap keputusan tersebut dapat tercermin melalui platform media sosial, di mana mereka aktif berdiskusi, berbagi pendapat, dan mengekspresikan pandangan mereka. Keputusan MK yang mengatur batasan umur calon pemimpin memiliki implikasi besar terhadap dinamika politik di Indonesia. Hal ini tidak hanya menciptakan diskursus di kalangan elit politik, tetapi juga memunculkan reaksi dan pandangan dari masyarakat, khususnya Generasi Z yang aktif di dunia digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai sikap digital Generasi Z terhadap Keputusan MK tentang batasan umur Capres/Cawapres.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Namun pada beberapa permohonan uji materiil yang lain yang memiliki permohonan yang sama seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit tinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (open legal policy). Pasca Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini, muncul berbagai pendapat serta komentar yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian terhadap putusan-putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menggemparkan dunia politik dan memicu reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat, karena keputusan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap memiliki kepentingan tertentu terkait keluarga. Keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu calon wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, meskipun secara usia calon tersebut belum memenuhi kriteria, ia tetap bisa maju sebagai cawapres karena saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia.

Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan terkait batas usia, putusan tersebut menambahkan persyaratan baru bagi calon di bawah usia 40 tahun, yaitu harus pernah menduduki jabatan melalui pemilihan, termasuk Pilkada. Mahkamah Konstitusi tampaknya tidak ingin terlihat jelas berpihak pada

kepentingan keluarga Jokowi, namun esensi dari putusan ini dianggap mengecoh penggugat, karena pada kenyataannya kandidat di bawah usia 40 tahun tetap bisa ikut serta dalam kontestasi.

Partai politik berlomba-lomba tampil di depan kamera, merekam kegiatan mereka yang diharapkan bisa menarik simpati publik. Tak jarang, sejumlah tokoh politik menambahkan gimmick atau trik tertentu demi mendapatkan perhatian. Gimmick ini dirancang dengan kreatif oleh para tokoh, seperti menggunakan humor, mengikuti tren terbaru, atau berbalas komentar mengenai isu-isu hangat di masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat lebih mudah mengenal karakter serta visi-misi para tokoh politik tersebut. Salah satu platform yang paling populer saat ini adalah media sosial. Media sosial telah berkembang pesat dan menarik minat banyak pengguna online, digunakan untuk komunikasi pribadi, pendidikan, promosi, serta berbagi informasi dan pengetahuan. (Abdillah, 2014.)

Peran Generasi Milenial dan Gen Z dalam proses politik dan demokratisasi saat ini sering kali dipandang hanya sebagai pelengkap yang suaranya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemenangan dalam Pemilu atau hanya sebagai elemen komplementer dalam berbagai momentum politik. Padahal, pada Pemilu 2019, kelompok pemilih berusia 17-35 tahun tercatat mencapai 55% (Survei Saiful Mujani Research and Consulting, 2019). Sementara itu, Milenial dan Gen Z cenderung memandang politik penuh dengan kepentingan pribadi dan sering kali menggunakan praktik instan. Beberapa dari mereka juga berpendapat bahwa tokoh dan elit politik masih didominasi oleh kelompok konservatif yang menerapkan metode politik tradisional, kurang inovatif, dan lebih berfokus pada mempertahankan kekuasaan. Desain kontestasi politik yang ada sering kali terbatas pada pola pikir menang atau kalah.

Media sosial adalah bentuk teknologi informasi yang berfungsi sebagai sarana interaksi dan pertukaran informasi secara dinamis, sehingga menarik perhatian bagi Generasi Milenial dan Gen Z (Saputro, 2022: 62-64). Kedua generasi ini dikenal sebagai "digital natives" yang terbiasa dengan kemajuan teknologi, cepat beradaptasi, dan merasa nyaman menggunakan berbagai perangkat digital. Media sosial sangat diminati oleh Milenial dan Gen Z untuk berbagi ekspresi, percakapan,

pengalaman, serta aktivitas mereka. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat tantangan terkait daya saing dan partisipasi mereka dalam pembangunan demokrasi. Di satu sisi, populasi besar generasi ini membawa potensi untuk membentuk generasi yang tangguh, kompetitif, dan berkontribusi pada kemajuan demokrasi, namun di sisi lain, jumlah mereka yang besar juga menghadirkan tantangan kependudukan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian dan porsi yang signifikan dalam kebijakan pembangunan strategis demi memperkuat demokrasi nasional.

Saat ini, media sosial telah menjadi tren dalam dunia politik di Indonesia, di mana platform ini dimanfaatkan dalam proses pemilu, khususnya sebagai sarana komunikasi politik. Media sosial, yang juga merupakan bagian dari media daring atau media baru, kini berperan penting sebagai hasil perkembangan teknologi dan digunakan untuk strategi serta sosialisasi politik karena biaya yang relatif rendah dan akses yang tidak terbatas. Penggunaan media sosial sebagai ruang dialog politik telah diterapkan dalam berbagai kesempatan.

Kemajuan internet di Indonesia dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah berkomunikasi melalui media sosial. Jumlah pengguna media sosial yang semakin besar kini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk para tokoh politik. Pesatnya perkembangan komunikasi melalui platform online menjadikan media sosial sebagai sarana promosi, termasuk untuk tujuan politik. Aplikasi jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya sangat berperan bagi para tokoh politik dalam membangun eksistensi serta menjalin kedekatan secara virtual melalui unggahan foto dan video.

Media sosial kini menjadi platform yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah kampanye politik (Russmann, 2022). Pemanfaatan media sosial untuk kampanye politik mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama menjelang Pemilu 2024. Pemilu ini diperkirakan akan menjadi ajang persaingan politik yang intens, di mana para kandidat dan partai politik akan berupaya keras meraih dukungan pemilih. Untuk menghadapi tantangan ini, media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana kampanye politik. Platform ini mampu menjangkau audiens yang luas, berinteraksi

langsung dengan pemilih, serta menyajikan konten kampanye secara kreatif dan menarik. (Moekahar dkk., 2022).

Pemilu, singkatan dari pemilihan umum, adalah proses demokratis di mana masyarakat memilih perwakilan mereka untuk pemerintahan atau institusi publik lainnya. Biasanya, pemilu dilakukan dengan memilih calon individu atau partai tertentu yang dianggap memiliki program serta visi yang selaras dengan aspirasi atau kebutuhan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang memungkinkan pemilihan anggota DPR, presiden, wakil presiden, serta anggota DPRD secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih dari generasi Y dan Z diperkirakan cukup signifikan, selaras dengan data survei penduduk yang diterbitkan oleh BPS dalam publikasi Statistik Indonesia 2022. Berdasarkan laporan tersebut, kelompok usia 25-44 tahun tercatat mencapai 85.520 jiwa hingga tahun 2021, atau sekitar 31% dari total populasi Indonesia (272.682 jiwa). Menurut Bencsik, Csikos, dan Juhez, kelompok umur ini diklasifikasikan sebagai generasi Y. Selain itu, dalam publikasi yang sama juga disebutkan bahwa kelompok usia 15-24 tahun berjumlah 44.777 jiwa, sekitar 16% dari total populasi Indonesia. Berdasarkan rentang tahun kelahiran yang dijelaskan oleh Bencsik, Csikos, dan Juhez, kelompok ini termasuk dalam kategori generasi Z.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana percakapan Gen Z di Media Sosial Instagram terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres/Cawapres?
- 2) Faktor apa yang memengaruhi pendapat Gen Z di Media Sosial Instagram Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres/Cawapres?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai sejauh mana Generasi Z di Indonesia memahami Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut
- 2) Mengidentifikasi peran dan pengaruh media sosial dalam membentuk sikap digital Generasi Z terkait keputusan MK
- 3) Menganalisis bagaimana Generasi Z berekspresi dan berinteraksi di media sosial

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan Manfaat dan kontribusi yang berarti kepada, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tentunya penelitian ini memberikan kontribusi dan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh sikap digital Gen Z di Media Sosial dalam menanggapi Keputusan MK dalam membentuk opini publik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkaya literatur akademis serta diskusi ilmiah mengenai seberapa besar pengaruh media sosial dan partisipasi politik di Indonesia. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dosen dan mahasiswa tentang pengaruh media sosial di kalangan Gen Z serta respon Gen Z dalam menanggapi putusan MK tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mereka yang tertarik dalam pengaruh media sosial, partisipasi politik dan representasi politik. Selain itu, adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk pengembangan penelitian-penelitian lain yang mengangkat tema serupa yang berfokus pada media sosial atau lebih tepatnya digitalisasi politik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini tentunya diharapkan bisa memberikan panduan praktis bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya Gen Z dalam kebijakannya menggunakan media sosial tentang keputusan MK terkait batasan usia Capres Cawapres. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk menganalisis keberhasilan, kelemahan, serta perbaikan yang perlu dilakukan kedepannya. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro serta menambah daftar keilmuan bagi perpustakaan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dicantumkan bertujuan untuk mendapatkan perbandingan serta referensi atas penelitian ini. Selain itu, untuk mengeksplorasi *research gap* dalam penelitian ini, dalam tinjauan pustaka ini peneliti memasukkan temuan-temuan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah media sosial dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang relevan bagi generasi Z. Hal tersebut didorong oleh kenyataan bahwa media sosial merupakan media yang lekat dengan anak-anak generasi Z. Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa media sosial memenuhi kriteria sebagai sebuah media pembelajaran.

Kemudian, terdapat penelitian berjudul “Analisis Penggunaan Bahasa Gaul pada Public Figure Jerome Polin” yang diteliti oleh Fauziah Nur Hasibuan, dkk. pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa gaul oleh Jerome Polin dengan fokus pada jenis-jenis bahasa gaul yang digunakan, konteks penggunaannya, serta implikasinya dalam komunikasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul oleh public figure dapat menarik minat pengikutnya namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pengaruhnya pada perkembangan bahasa dan budaya Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan public figure dan pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Indonesia, yang mencerminkan dinamika dan kreativitas dalam penggunaan bahasa di era digital.

Berikutnya Penelitian berjudul “ Literasi Digital sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax” yang di teliti oleh Anisa Rizki Sabrina pada tahun 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi literasi digital, bagaimana pengaruhnya, serta cara meningkatkan kecakapannya sebagai upaya menanggulangi hoax. Dengan menggalakkan

literasi digital, pengendalian diri terhadap penggunaan media sosial dapat dilakukan secara optimal. Peningkatan literasi digital sebagai bentuk self control menjadi solusi untuk mencegah kasus peredaran informasi palsu (hoax) menjadi berulang dan semakin banyak.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Merle Emanuella Aipassa dengan judul “Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi kehadiran kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan dalam mewujudkan kebebasan berpendapat di media sosial. AI, dengan kemampuannya mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dalam jumlah besar, telah melampaui kapasitas manusia dalam beberapa aspek. Meskipun awalnya AI berdampak pada ilmu alam dan eksakta, pengaruhnya kini meluas hingga ekonomi dan kehidupan sosial. Salah satu area penting adalah media sosial, yang penggunaannya mencapai 4,76 miliar pada awal 2023.

Yang terakhir penelitian yang berjudul “Perilaku Dan Partisipasi Politik Generasi Z” yang diteliti Moh. Arief Rakhman dan Hariyadi pada tahun 2019 menjelaskan bahwa Penelitian ini membahas Generasi Z di Indonesia sebagai generasi *digital native* pertama yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari generasi sebelumnya. Populasi besar dan antusiasme tinggi mereka terhadap partisipasi politik telah menarik perhatian banyak pihak. Survei dan penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memerlukan media partisipatif yang inovatif dan sesuai dengan preferensi mereka, karena fasilitas yang ada saat ini mungkin tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan mereka. Generasi ini lebih tertarik pada hal-hal baru dan inovatif yang dapat menampung aspirasi politik mereka, sering kali dalam bentuk yang belum populer di Indonesia atau hanya diketahui oleh kelompok mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan politik untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi unik mereka. Generasi Z memiliki potensi besar dalam membawa perubahan positif bagi bangsa, yang menjadikannya kelompok penting dalam proses politik dan sosial di masa depan.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat dilihat bahwa media sosial sangat berpengaruh bagi generasi Z khususnya dalam menanggapi Keputusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres. Respon Gen Z terhadap keputusan MK tentang batas usia capres dan cawapres dapat dianalisis melalui pendekatan literasi digital, partisipasi politik, pengaruh sosial media, serta kebebasan berpendapat. Gen Z sebagai pengguna aktif Instagram berperan besar dalam membentuk opini publik terkait isu tersebut.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Demokrasi Digital

Dalam pengertian umum dan dikenal luas, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan kepentingan rakyat sendiri *“A government comes from the people, it is exercised by the people, and for the purpose of the people’s own interests”*.

Istilah demokrasi digital *“Digital democracy”* bersatu-padan dengan demokrasi elektronik *“e-democracy”*, yakni penggunaan TIK untuk meningkatkan dan dalam sejumlah hal akun menggantikandemokrasi perwakilan *“E-democracy, in full electronic democracy, the use of informationand communication technologies to enhance and in some accounts replace representative democracy”*. Munculnya istilah *“e-democracy”* sendiri belum memperoleh kesepakatan di kalangan teoritisi, kendati secara konseptual sebagian besar dari para ahli tersebut telah berhasil merumuskan konsep demokrasi elektronik itu berkaitan dengan konsep tradisional kewargaan dalam politik demokrasi-liberal . Hanya saja pengertian demokrasi elektronik menempati problematika skala *“problems of scale”*, kelangkaan waktu *“Scarcity of time”*, kemunduran masyarakat *“decline of community”*, dan kurangnya peluang untuk menjadi pertimbangan kebijakan *“lack of opportunities for policy deliberation”*, melalui saluran komunikasi atau daring *“can be overcome by new forms of online communication”*.¹

¹ Sardini, N. H. (2018). Demokrasi dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).

Indonesia adalah pengguna Internet terbesar keempat di dunia dan termasuk dalam enam besar pengguna jejaring sosial. Negara ini adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia, Instagram keempat, dan Twitter keenam. Maka masuk akal jika internet dan media sosial telah berdampak pada banyak aspek politik Indonesia, termasuk demokrasi di negara ini. Fenomena tersebut telah melahirkan banyak literatur yang dapat digolongkan menjadi dua aliran pemikiran. Kewarganegaraan digital sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan di dunia maya, di mana subjek politik mengalami berbagai proses subjektivasi yang memungkinkan mereka menjadi warga negara. Melalui proses subjektivitas inilah ia menjadi sadar akan hak-haknya dan memberi wewenang pada dirinya sendiri untuk menuntut hak-hak tersebut.²

Munculnya kewarganegaraan digital di Indonesia bukan hanya sekedar kemampuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan online dengan perilaku etis yang ditentukan, namun sebagai serangkaian tindakan yang menunjuk subjek politik yang muncul dari pertemuan antara negara dan warganya di Internet dan media sosial (Isin & Ruppert, 2015). Rangkaian tindakan ini dipahami sebagai tindakan digital yang merupakan semua tindakan ujaran yang diucapkan melalui aktivitas online seperti blogging, pesan, email, tweeting, posting, menyukai, dan berkomentar.³

Jumlah pengguna Internet yang mayoritas berusia muda sangat memungkinkan terlibat dalam partisipasi politik di dunia digital. Seperti yang disampaikan oleh Almond & Verba (1965) setidaknya ada lima faktor yang dapat memberikan dorongan terhadap keinginan warga negara untuk berpartisipasi, yaitu :

² Wijayanto, W (2022, May 9) *The Rise Of Digital Citizenship amidst Indonesia Democratic Regression*, p. 5.

³ Fauzanafi, M. Z. (2016). *Searching of Digital Citizenship: Fighting Corruption in. ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 290.

- 1) Modernisasi
- 2) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
- 3) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan ekonomi, sosial, ekonomi, dan kerakyatan
- 4) Perubahan struktur kelas sosial
- 5) Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik.

Prospek dan tantangan demokrasi digital di Indonesia berjalan beriringan. Wilhelm (2003) mengajukan beberapa pandangan menghadapi demokrasi digital, yaitu :

- a. Ketersediaan infrastruktur yang bisa memacu spirit publik untuk melakukan partisipasi politik
- b. Memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk kelompok marginal yang nyatanya masih belum terfasilitasi
- c. Pemeliharaan kualitas diskusi dalam masyarakat jaringan ala castells
- d. Hilangnya ruang publik di bawah tekanan kekuatan pasar yang mendominasi. Keempat tantangan ini menjadi pekerjaan rumah warga-net indonesia, mengingat pluralisme pengguna dan sirkulasi informasi yang semakin meningkat

Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, mendefinisikan demokrasi sebagai “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Dalam teori demokrasi tradisional, setiap individu berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Sebuah prinsip penting dalam demokrasi adalah kesetaraan politik (political equality), yang menurut pemikiran Dahl (1998), hanya dapat diwujudkan dalam pemerintahan demokratis yang mengakui dan menghormati harkat dan martabat setiap individu.

Peluang besar dari demokrasi digital terletak pada perluasan ruang interaksi antar pemangku kepentingan dalam proses demokrasi. Dalam

kerangka demokrasi tradisional, konsep ini telah membuka ruang bagi dialog antara berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat mereka di ruang publik tanpa takut menghadapi risiko politik atau tekanan lainnya. Demokrasi digital berfungsi memperluas partisipasi publik, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik secara setara.

1.6.2. Anak Muda dan Politik: Antara Kesempatan dan Privilege

Sebagai kelompok pemilih dengan jumlah terbesar, kaum muda dengan usia 40 tahun ke bawah, mempunyai daya tawar tinggi untuk terlibat aktif dalam panggung politik. Keterlibatan kaum muda itu memerlukan ruang berpolitik yang adil dan transparan. Masa remaja merupakan saat-saat di mana mereka ingin mencoba mengikuti proses pemilu. Pertumbuhan partai politik di Indonesia tidak dimbangi dengan kemampuan memahami kepentingan anak muda. Jika dilihat lebih lanjut, pemuda dapat memberikan keuntungan besar bagi partai politik jika mereka diberikan pendidikan politik yang intensif. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kesadaran politik yang tinggi dan menjadi lebih kritis terhadap dinamika politik yang berlangsung. Partai politik pun akan mendapat manfaat karena dapat melakukan proses kaderisasi sejak dini. Namun, tampaknya banyak partai politik yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya hal ini.

Generasi muda memiliki dua peran penting, yaitu sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan agen pengontrol (*agent of control*). Kedua peran ini menempatkan mereka dalam posisi strategis dalam dinamika sosial dan politik. Sebagai bagian dari kelas menengah dalam struktur sosial politik, generasi muda memainkan peran kunci dalam menjaga kelangsungan demokrasi, sementara elit politik berada di kelas atas dan masyarakat umum berada di kelas bawah. Peran generasi muda sebagai kelas menengah menjadikan mereka sebagai penjaga dan pengawal proses demokrasi.

Menurut Daniel Susilo dan Teguh Dwi Putranto (2018), meskipun generasi muda cenderung menggunakan media sosial sebagai alat

komunikasi pribadi untuk membahas masalah-masalah personal (peer to peer communication), terdapat juga temuan yang menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan platform ini untuk mendiskusikan isu-isu politik di halaman media sosial mereka.

Definisi kaum muda dalam konteks ini lebih mengacu pada pemikiran dan bukan usia. Gerakan-gerakan yang dimotori oleh kaum muda memiliki dampak yang mendalam dan berkelanjutan. Peran generasi muda dalam peristiwa sejarah seringkali terletak pada bagaimana gerakan mereka diterima dan dilembagakan dalam sistem sosial. Dalam partai politik, anak muda memainkan peran yang sangat penting sebagai kekuatan inti di dalam struktur partai itu sendiri. Sumber daya yang mereka miliki, seperti pendidikan, idealisme, serta kemampuan dalam mengelola massa dan teknologi, membuat PSI tertarik untuk memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda dalam mengembangkan arah partai. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu lebih memahami kontribusi anak muda dalam perubahan sosial untuk merancang kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan melihat potensi partisipasi politik anak muda, terutama dalam kelompok aktivis daring, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan peluang bagi mereka untuk berkontribusi pada perbaikan sosial..⁴

Generasi muda sering kali disebut sebagai masa depan bangsa, sebuah ungkapan yang sering disampaikan oleh para politisi dan aktivis. Keberadaan generasi muda senantiasa berhubungan erat dengan dinamika sosial politik suatu negara, termasuk Indonesia. Hampir semua revolusi sosial politik besar di Indonesia melibatkan peran aktif generasi muda. Salah satu momen penting dalam keterlibatan mereka dimulai dengan Sumpah Pemuda pada 1928, yang menjadi tonggak awal persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, peran besar generasi muda terlihat lagi selama revolusi kemerdekaan 1945, terutama dalam perlawanan fisik melawan penjajahan.

⁴ Farokhi, T. Y. (2021). *PARTISIPASI POLITIK ANAK MUDA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi pada Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Keterlibatan generasi muda kembali mencuat pada 1966, saat mereka berperan dalam gerakan Tritura untuk menuntut perubahan politik, yang pada akhirnya mengakhiri Orde Lama. Di masa reformasi 1998, kaum muda kembali memainkan peran krusial dalam menggulingkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. ⁵

Gerakan demonstrasi mahasiswa yang secara masif dilakukan pada bulan Mei 1998, akhirnya menumbangkan Soeharto dari kepemimpinan politik di Indonesia. Itulah bukti gerakan pemuda memiliki peran penting dalam sejarah revolusi bangsa Indonesia. Namun setelah transformasi sistem politik Indonesia di awal tahun 2000-an telah membuat kemerosotannya menjadi marginal dan menyebabkan polarisasi yang ditentukan oleh Islam konservatif kanan dan kelompok progresif kiri. Pada era digital saat ini, dimana revolusi teknologi, sosial dan budaya telah memasuki gelombang ke-4 atau 4.0. Dimana keberadaan generasi muda semakin mendominasi kehidupan sehari-hari karena interaksi dan konektivitas yg tinggi dengan segala hal yang berbau digital.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis data jumlah pemilih muda pada Pemilu 2014, dengan pemilih berusia 17-20 tahun tercatat sebanyak 14 juta orang, sementara pemilih berusia 20-30 tahun mencapai 45,6 juta orang. Dengan demikian, sekitar 40% dari total 189 juta pemilih pada Pemilu 2014 merupakan kelompok anak muda. Suara pemilih muda ini dianggap sangat mempengaruhi hasil Pemilu dan menjadi target utama bagi berbagai partai politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa suara anak muda bukan hanya sekadar angka, melainkan memiliki potensi besar dalam menentukan arah politik negara.

Anak muda memegang peran penting sebagai kekuatan politik, sementara partai politik bertindak sebagai sarana bagi mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan gerakan, kekuatan moral, dan idealisme mereka, anak muda berkontribusi dalam perubahan sosial dan

⁵ Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2022). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. *Konservasi Pendidikan*, (3), 1-29.

politik. Keikutsertaan aktif mereka dalam politik sangat penting, dan partai seperti PSI memanfaatkan posisi ini untuk mengajak masyarakat, terutama kalangan muda, untuk turut serta memberikan dukungan politik.

Dalam sejarah panjang Indonesia, keterlibatan anak muda dalam politik telah melalui berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masanya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, generasi muda sudah menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi, sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari penjajahan. Peran pemuda dalam politik Indonesia di abad ke-20 adalah cerminan dari perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Pembentukan Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang menjadi simbol kebangkitan nasional, membawa nilai-nilai perjuangan dan diikuti oleh gerakan-gerakan lainnya seperti Taman Siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, serta Muhammadiyah yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan. Pada tahun 1928, anak muda Indonesia semakin berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dengan memobilisasi berbagai gerakan kebangsaan.

Faktor-faktor yang mendorong anak muda untuk terlibat dalam politik sangat terkait dengan perbedaan nilai antara generasi muda dan generasi sebelumnya. Generasi muda melihat permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia—mulai dari peristiwa revolusi 1945, hingga tantangan modern seperti kesempatan kerja dan kebebasan berpendapat. Anak muda merasa terdorong untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, karena mereka yang akan merasakan dampaknya dan menentukan arah masa depan bangsa.⁶

1.6.3. Partisipasi Politik

Partisipasi secara harfiah dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau proses. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan

⁶ Saputra, R. (2018). *Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah).

ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa (Adams, 2004:83). Partisipasi dalam konteks politik merujuk pada keterlibatan warga dalam berbagai proses politik.

Partisipasi politik adalah salah satu karakteristik utama dari modernisasi politik, di mana peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat mendorong terjadinya partisipasi yang lebih aktif. Di masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik sering dianggap sebagai hal yang hanya relevan bagi elit tertentu. Golongan petani, buruh, dan pedagang kecil umumnya kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, sebaliknya, mereka juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan pemerintah melalui kekuatan politik agar berpihak kepada mereka.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengartikan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.⁷ Huntington dan Nelson (1994:4) pada bukunya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* mendefinisikan partisipasi politik yakni:

“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merujuk pada aktivitas individu atau kolektif warga negara yang bertujuan mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara terorganisir maupun spontan, secara berkelanjutan atau sporadik, dengan damai atau melalui kekerasan, legal atau ilegal, serta bisa efektif atau tidak efektif. Definisi tersebut menekankan pada peran individu dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau melakukan kegiatan politik lain

⁷ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 4.

yang dianggap berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah, namun tidak mencakup kegiatan pejabat birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist profesional yang bertindak dalam konteks jabatan yang mereka emban.

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai partisipasi aktif dalam konteks politik. Ini mencakup keterlibatan individu dalam berbagai proses politik, mulai dari tahap pengambilan keputusan hingga evaluasi keputusan tersebut. Hal ini juga mencakup kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela, sadar, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun. Oleh karena itu, partisipasi politik sangat terkait dengan pemahaman masyarakat atau pemilih terhadap pendidikan politik. Partisipasi politik merupakan syarat mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat membutuhkan adanya saluran komunikasi politik yang terbuka sebagai bentuk partisipasi warga.

Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk berpartisipasi dalam politik, yakni:

1. Status sosial dan ekonomi

Menurut Surbakti (1992), Status sosial merujuk pada posisi individu dalam masyarakat yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Sementara itu, status ekonomi mengacu pada posisi seseorang dalam struktur sosial berdasarkan kepemilikan kekayaan. Individu dengan status sosial yang tinggi cenderung memiliki pengetahuan politik yang lebih baik, serta minat dan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu politik.

2. Situasi

Keadaan politik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi individu, seperti kondisi cuaca, dinamika keluarga, keberadaan orang lain, lingkungan fisik, atmosfer dalam kelompok, serta potensi ancaman yang ada,

3. Afiliasi politik orang tua

Afiliasi merujuk pada keterlibatan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Afiliasi politik dapat diartikan sebagai hubungan atau kerjasama individu atau kelompok dengan aliran politik tertentu. Afiliasi ini berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kematangan politik masyarakat, mendorong mereka untuk menggunakan hak politik secara bebas dan bertanggung jawab, baik dalam berpartisipasi di partai politik, maupun dalam pengambilan dan implementasi keputusan politik. (Surbakti, 1992).

4. Pengalaman berorganisasi

Menurut Simangunsong (2004), Organisasi merupakan suatu system yang mengatur kehidupan masyarakat atau bias diartikan sebagai suatu prilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama.

5. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara mencakup pemahaman individu mengenai lingkungan sosial dan politik, serta menunjukkan minat dan perhatian terhadap kondisi masyarakat dan politik di tempat dia berada. (Hendrik, 2010).

6. Kepercayaan terhadap pemerintah

Menurut Hendrik (2010), Kepercayaan publik terhadap pemerintah merujuk pada penilaian individu mengenai sejauh mana pemerintah dianggap dapat diandalkan dan dipercaya, baik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

7. Stimulan partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal (Hendrik, 2010).

Media turun memberikan peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pemilu yang dianggap sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi partisipasi politik. Melalui media, informasi tentang jadwal, lokasi, prosedur pemilihan, dan informasi terkait pemilu lainnya dapat tersebar secara luas. Dengan adanya informasi yang mudah diakses ini,

pengetahuan masyarakat tentang pemilu dapat meningkat, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi. Selain itu, diskusi-diskusi yang dilakukan secara santai dan tidak formal juga dianggap memiliki kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilu. Semua ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu.

1.6.4. Kewarganegaraan Digital (Digital Citizenship)

Bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, dan membawa pengaruh pada bentuk partisipasi warga negara yang menggunakan media digital memunculkan konsep baru yaitu kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). *Digital citizenship can be defined as a norm of behavior related to the use of technology, or it can be interpreted that digital citizenship is the ability to participate in online societies (Mossberger, 2007:25)*. Kewarganegaraan digital dapat juga diartikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi secara kompeten, menafsirkan, dan memahami konten digital serta menilai kredibilitasnya kemudian membuat, meneliti, serta berkomunikasi dengan alat yang tepat dan dapat berpikir kritis tentang tantangan dunia digital Triastuti (2019:25).

Kewarganegaraan digital sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan di dunia maya, di mana subjek politik mengalami berbagai proses subjektivasi yang memungkinkan mereka menjadi warga negara. Melalui proses subjektivitas inilah ia menjadi sadar akan hak-haknya dan membiarkan dirinya mengklaim hak-hak tersebut. Seperti yang dikatakan Isin dan Ruppert (2020,61). Kewarganegaraan didefinisikan sebagai tindakan melakukan tindakan digital yang diwujudkan dalam bentuk tindak tutur atau yang mereka sebut “bertindak dengan kata-kata”. Mereka secara lebih spesifik membagi tindakan digital menjadi tiga kategori: panggilan, pembukaan, dan penutupan. Banding adalah tindakan yang berupa pemanggilan subyek warga negara; mereka diekspresikan dalam bentuk partisipasi, koneksi dan berbagi. Keterbukaan dapat dianggap sebagai kemungkinan yang

memunculkan cara-cara baru dalam merumuskan dan menerapkan hak, yaitu menjadi subjek warga negara: ini adalah pertanyaan tentang bersaksi, meretas, dan menciptakan komunitas. Penutupan, di sisi lain, membuat kontrak dan mengurangi kemungkinan menjadi subjek warga negara; misalnya dalam bentuk penyaringan, pemantauan dan standardisasi. Skenario yang disebutkan dalam baris berikut ini mendapat manfaat jika dipertimbangkan melalui filter proses yang dikemukakan oleh Isin dan Ruppert.⁸

Kewarganegaraan, dalam pengertian ini, dapat dianggap sebagai aktivitas tidak resmi, subyektif, tingkat meso, yang terjadi di berbagai situs termasuk media sosial, dan hal-hal terkait lainnya. dengan aktivitas performatif, seperti memposting, berkomentar, menyukai, berbagi, dan lain sebagainya. Seperti yang disarankan oleh Isin (2008), “tindakan permusuhan, keramah tamahan, ketidak pedulian, cinta, persahabatan tidak dapat direduksi menjadi kewarganegaraan, namun dapat terkait dengan kewarganegaraan dalam cara yang signifikan”. Temuan awal ini menunjukkan bentuk-bentuk baru kewarganegaraan (*digital*) yang melampaui kerangka teori dominan yang mendefinisikan warga negara ideal sebagai warga negara yang mengambil keputusan berdasarkan alasan. Untuk memahami ungkapan-ungkapan baru ini, kita harus memperhitungkan unsur-unsur komunikasi dan afektif yang dimediasi dan dimediasi bagaimana kewarganegaraan dirasakan, dialami, dan dipraktikkan dalam dan melalui ruang sosial digital.⁹

Saat ini, dalam konteks kewarganegaraan, muncul konsep baru yaitu warga negara digital yang memiliki karakteristik perilaku yang berkaitan dengan teknologi. Bailey & Ribble menjelaskan bahwa warga negara digital adalah individu yang memiliki pemahaman tentang kewarganegaraan, keterampilan

⁸ Wijayanto, W (2022, May 9) *The Rise Of Digital Citizenship amidst Indonesia Democratic Regression*, p. 6.

⁹ Fauzanafi, M. Z. (2016). *Searching for Digital Citizenship: Fighting Corruption in. ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 290.

yang relevan, serta sikap yang tepat, yang diimbangi dengan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi dan informasi secara efektif.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memahami secara mendasar dalam bentuk yang terorganisir yang lebih dengan ketelitian dan kritis guna menemukan fakta untuk menentukan sesuatu. Menurut parson penelitian adalah sebuah kegiatan untuk menemukan fakta atas sesuatu secara bertahap dengan yakin bahwa sebuah pencarian tersebut akan mendapatkan hasil untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Maka metode penelitian menjadi cara untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam proses mencari fakta untuk menemukan sesuatu.

1.7.1. Desain penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis studi kasus. Desain penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan. Desain kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengeksplorasi perilaku dan pengalaman subjek penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk percakapan, tulisan, dan tindakan dari individu yang diamati. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena melalui pendekatan berpikir induktif. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menganalisis Studi Kasus Sikap Digital Gen Z terhadap Keputusan MK tentang Batasan Umur Capres/Cawapres, seberapa pengaruh media dan sikap digital Gen Z dalam memengaruhi opini publik. Dengan demikian, penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah digitalisasi politik terkait keputusan MK tersebut.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang situasi dalam konteks tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan komprehensif mengenai kondisi tersebut dalam lingkungan yang alami atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

1.7.2. Situs Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan pada Media Sosial Instagram, *flexible* mengikuti kesediaan dari informan yang akan diwawancarai khususnya generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 atau Generasi Z.

1.7.3. Subjek/Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Generasi Z yang berkomentar dalam kolom komentar postingan Instagram terkait putusan MK tentang batasan usia Capres/Cawapres.

1.7.4. Jenis atau Sumber Data

Memahami berbagai jenis sumber data dalam penelitian sangat penting bagi seorang peneliti. Keberhasilan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data yang tepat akan memengaruhi akurasi, kedalaman, dan kevalidan informasi yang diperoleh. Faktanya, tanpa adanya sumber data, informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa menariknya topik penelitian yang dihadapi, jika sumber data yang relevan tidak tersedia, penelitian tersebut menjadi tidak bermakna karena tidak dapat diteliti dan dipahami.

Sumber data dalam penelitian kualitatif memiliki variasi jenis dan posisi yang berbeda, mulai dari yang paling jelas dan terlihat hingga yang lebih samar, serta dari yang merupakan data primer hingga sekunder,

1. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada sumber data yang berisi informasi utama yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, seperti melalui wawancara dengan narasumber atau *informant*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui sumber yang telah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Contohnya termasuk buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat

digunakan dalam penelitian sebagai pelengkap atau bahkan sebagai sumber utama jika tidak ada narasumber yang tersedia.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya, dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengamatan, peneliti berfokus pada tiga komponen penting, yaitu ruang/tempat (*space*), pelaku (*actor*), dan kegiatan (aktivitas). Selama proses penelitian, peneliti menjadikan dirinya sebagai instrumen utama yang secara intensif terlibat di lapangan.

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, narasumber yang berperan sebagai informan merupakan sumber data utama (primer). Oleh karena itu, wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cermat, mendalam, dan komprehensif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan.

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber berperan sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

2. Observasi

Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat secara sistematis mengamati dan merekam kegiatan serta interaksi yang terjadi antara subjek penelitian. Semua informasi yang diperoleh dari observasi, baik yang terlihat maupun didengar, dapat dicatat dan direkam sesuai dengan tema dan masalah penelitian yang sedang diinvestigasi.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Tahap ini merupakan komponen yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk

mengungkapkan solusi terhadap masalah penelitian yang dihadapi. Data mentah yang telah dikumpulkan tidak memiliki nilai jika tidak diolah dan dianalisis. Oleh karena itu, data mentah perlu dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan dan kemudian dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dimulai dengan mengkaji secara teliti semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang beragam tersebut diperiksa dengan seksama, dipelajari, dan direduksi dalam bentuk abstraksi. Setelah abstraksi dibuat, data kemudian disusun berdasarkan tema-temanya dan dilakukan penafsiran guna mendapatkan temuan sementara. Proses ini dapat berulang-ulang sehingga data dapat direduksi menjadi sebuah teori substantif yang lebih komprehensif.

1. Reduksi Data

Tahap awal dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data merupakan langkah yang penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempersempit, mengelompokkan, mengarahkan, memperjelas, dan mengedepankan fokus penelitian. Dalam proses ini, data yang kurang relevan atau tidak penting dihilangkan, dan data yang ada diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga narasi data dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi menjadi narasi yang lengkap, deskripsi yang rinci, dan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Data disusun berdasarkan temuan utama yang muncul dari proses reduksi data. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan berbagai elemen seperti matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar data yang disajikan untuk analisis terlihat jelas, rinci, dan mudah dipahami. Data disusun secara sistematis dan mengikuti tema-

tema inti sehingga interaksi antarbagian data dapat dipahami dalam konteks yang utuh.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi/Penarikan dalam penelitian kualitatif melibatkan kegiatan penafsiran dan interpretasi data. Pentingnya verifikasi terhadap simpulan tersebut selama penelitian berlangsung untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROFIL AKUN INSTAGRAM DAN DINAMIKA GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL

2.1. Gambaran Umum Akun Instagram

Instagram adalah platform media sosial yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda seperti Gen Z. Aplikasi ini berfokus pada berbagi foto dan video, memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi melalui fitur "like", komentar, dan pesan langsung. Instagram juga menyediakan fitur "stories", di mana pengguna bisa membagikan momen sehari-hari yang hanya bertahan selama 24 jam, serta fitur "reels" untuk video pendek kreatif yang mirip dengan konten di TikTok. Selain itu, banyak figur publik, influencer, hingga politisi yang aktif menggunakan Instagram untuk membangun brand, menyebarkan pesan, atau berinteraksi dengan pengikut mereka. Sebagai mahasiswa, Instagram menjadi salah satu sumber informasi yang cepat dan interaktif untuk mengikuti tren, berita, dan opini publik. Platform ini juga memudahkan pengguna untuk menyuarakan pendapat mereka melalui postingan, story, atau komentar, sehingga sering menjadi tempat diskusi isu-isu terkini seperti keputusan politik dan sosial

2.1.1. Profil Akun Mahkamah Konstitusi

Gambar 2.1. Profil Instagram Mahkamah Konstitusi



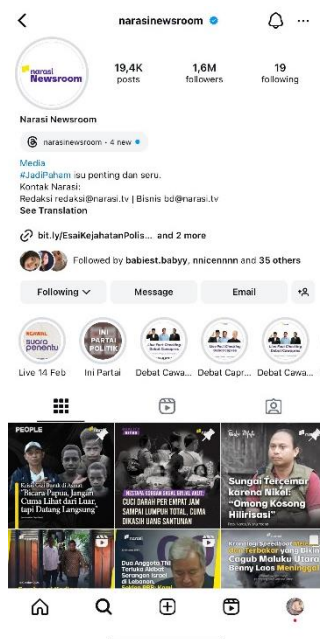
Sumber: Instagram Mahkamah Konsitusi

Akun Instagram *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (@mahkamahkonstitusi) adalah platform resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi, dan putusan-putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Akun ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas publik terhadap proses hukum dan konstitusional di Indonesia. Konten yang disajikan meliputi pengumuman resmi, infografis tentang keputusan-keputusan penting, dokumentasi sidang, serta edukasi mengenai hak-hak konstitusional warga negara. Melalui akun ini, MK juga memberikan penjelasan terkait prosedur pengujian undang-undang, mekanisme sidang, serta berita seputar isu-isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu, akun ini berperan penting dalam menyebarkan informasi mengenai berbagai kegiatan kelembagaan, seperti seminar, diskusi publik, atau sosialisasi terkait konstitusi. Dengan menggunakan bahasa yang formal namun informatif, *Mahkamah Konstitusi* di Instagram berusaha menjangkau

masyarakat luas, termasuk kalangan muda, agar lebih memahami peran dan pentingnya hukum konstitusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

2.1.2. Profil Akun Instagram Narasi Newsroom

Gambar 2.2. Profil Instagram Narasi Newsroom



Sumber: Instagram Narasi Newsroom

Akun Instagram *Narasi Newsroom* (@narasinewsroom) adalah platform media sosial yang aktif menyajikan konten-konten berita dan informasi terkini dengan gaya yang menarik dan mudah dipahami, terutama untuk kalangan anak muda. Akun ini mengangkat berbagai topik mulai dari politik, sosial, ekonomi, hingga budaya pop, dengan fokus pada isu-isu penting yang sering kali luput dari sorotan media arus utama. Konten yang disajikan beragam, termasuk infografis, video, cuplikan wawancara, dan laporan lapangan, yang semuanya dirancang untuk memberikan informasi secara cepat dan visual.

Narasi Newsroom juga sering menyuarakan opini kritis terhadap berbagai kebijakan publik dan fenomena sosial, sehingga kerap menjadi pusat diskusi di kalangan pengikutnya. Selain memberikan berita, akun ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu-isu demokrasi, hak digital, kebebasan berekspresi, serta pendidikan politik. Dengan tampilan yang modern dan relevan, *Narasi* berhasil menarik perhatian banyak pengguna Instagram, terutama generasi muda yang mencari informasi aktual dan perspektif alternatif tentang perkembangan di Indonesia

2.1.3. Profil Akun Instagram Kumparan

Gambar 2.3. Profil Instagram Kumparancom



Sumber: Instagram Kumparancom

Akun Instagram *kumparancom* (@kumparancom) adalah salah satu platform berita digital terkemuka di Indonesia yang menyajikan informasi terkini dalam berbagai format visual, mulai dari foto, video pendek, hingga infografis. *kumparancom* memanfaatkan kecepatan dan daya tarik visual Instagram untuk mengabarkan peristiwa terbaru secara real-time, mulai dari berita politik, ekonomi, kriminal, hingga hiburan dan olahraga.

Dinamika konten di akun ini sangat cepat dan beragam, sering kali menampilkan breaking news atau kejadian penting yang baru terjadi, sehingga pengikutnya dapat selalu mengikuti perkembangan situasi terkini. Dengan caption yang ringkas namun informatif, *kumparancom* mampu menarik perhatian pengguna Instagram yang mencari informasi cepat dan langsung. Selain itu, akun ini kerap memanfaatkan fitur-fitur seperti Instagram Stories dan Reels untuk menyajikan highlight berita, membuatnya lebih interaktif dan mudah dijelajahi. Akun ini juga aktif mengajak pengikutnya berpartisipasi melalui polling, komentar, atau diskusi di kolom komentar, menciptakan ruang untuk berdialog dan berbagi pendapat. Kombinasi antara kecepatan, keakuratan, dan interaktivitas membuat *kumparancom* menjadi salah satu sumber berita paling populer di kalangan pengguna Instagram di Indonesia.

2.2 Gambaran Umum dan Dinamika Generasi Z di Media Sosial

2.2.1.1. Generasi Z sebagai pengguna aktif media sosial

Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, dikenal sebagai generasi "digital native" yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi dan internet. Menurut laporan We Are Social (2023), lebih dari 70% pengguna Instagram berasal dari kelompok usia 18-34 tahun, yang sebagian besar termasuk dalam kategori Generasi Z. Sebagai pengguna aktif media sosial, Gen Z memiliki karakteristik unik, seperti ketergantungan pada media digital untuk mendapatkan informasi, serta kemampuan mereka untuk dengan cepat merespon isu-isu sosial dan politik melalui platform online.

Generasi Z banyak menggunakan platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Menurut survei Nielsen yang dilakukan di 11 kota besar di Indonesia, sebanyak 68% remaja usia 15-19 tahun menganggap bahwa generasi muda yang tumbuh di era media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, dan Instagram, sangat terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Generasi Z sangat akrab dengan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Khan & Bansal

(2018) serta Helaludin (2019, p. 35) menjelaskan bahwa generasi ini tumbuh di tengah kemajuan internet dan jaringan global. Fenomena yang mencirikan mereka termasuk 5,1 milyar pencarian informasi di Google setiap hari, 4 milyar penonton YouTube, lebih dari 1 milyar pengguna Facebook di seluruh dunia, dan lebih dari 1 milyar pengguna aplikasi musik iTunes. Dalam survei Nielsen 2016, Hellen Katherina, Executive Director dan Head of Watch Business di Nielsen Indonesia, mengungkapkan bahwa generasi Z memiliki kemampuan dan kesempatan yang luas untuk mengakses serta memanfaatkan internet sejak usia muda.

Sebagai generasi yang pertama kali akan memberikan suara dalam Pemilu 2024, partisipasi politik Gen Z menjadi sangat signifikan. Berdasarkan temuan dari Norris (2003), meskipun Gen Z cenderung lebih apatis terhadap politik tradisional, mereka lebih proaktif di media sosial dalam merespon isu-isu politik. Ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram, memainkan peran penting dalam membentuk opini politik di kalangan Gen Z.

2.2.1.2. Respon Gen Z terhadap Isu Politik di Media Sosial

Respon Generasi Z terhadap isu politik di media sosial telah menjadi topik yang penting untuk diteliti, terutama karena generasi ini menunjukkan pola partisipasi politik yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gen Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, dikenal sebagai kelompok *digital native*, di mana penggunaan media sosial menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mempengaruhi cara mereka terlibat dalam diskusi politik dan mengonsumsi informasi terkait isu-isu sosial dan politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang respon Gen Z terhadap isu-isu politik di media sosial semakin meningkat. Menurut studi dari Bennett et al. (2011), Gen Z cenderung menunjukkan keterlibatan politik yang lebih partisipatif melalui media sosial, baik dalam bentuk kampanye digital, petisi online, atau sekedar menyuarakan pendapat pribadi. Instagram sebagai platform yang berorientasi visual dan interaktif

memungkinkan Gen Z untuk mengekspresikan pandangan politik mereka dengan cara yang unik, misalnya melalui meme, infografis, dan video pendek.

Gen Z juga dikenal memiliki sikap kritis terhadap isu-isu yang dianggap mempengaruhi masa depan mereka. Misalnya, dalam kasus keputusan MK tentang batas usia Capres/Cawapres, reaksi Gen Z di Instagram dapat berupa dukungan terhadap peluang generasi muda untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, atau sebaliknya, penolakan terhadap dinamika politik yang dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Berdasarkan kajian literatur dari Linders (2020), Gen Z seringkali lebih tertarik pada isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial, keterwakilan politik, dan inklusivitas.

Gen Z cenderung menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk mengungkapkan opini politik mereka. Mereka lebih memilih untuk terlibat dalam bentuk partisipasi politik yang *non-konvensional*, seperti membuat atau membagikan konten politik, mengikuti diskusi online, menandatangani petisi digital, dan terlibat dalam kampanye sosial di Instagram, Twitter, TikTok, dan platform lainnya. Hal ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih banyak terlibat dalam bentuk partisipasi politik konvensional, seperti hadir dalam pertemuan politik atau terlibat dalam partai politik.

Salah satu karakteristik unik dari respon Gen Z terhadap isu politik adalah kecepatan mereka dalam merespon isu-isu terbaru. Media sosial memberikan akses cepat terhadap informasi, dan Gen Z dapat dengan segera memberikan tanggapan atau mengambil posisi terhadap isu politik yang sedang berkembang. Mereka sering merespon dengan membagikan informasi, berpartisipasi dalam diskusi, atau mengekspresikan opini mereka melalui konten visual atau teks.

Gen Z adalah generasi yang sangat terampil dalam memanfaatkan hashtag untuk menyatukan suara mereka dalam suatu isu politik.

Penggunaan hashtag seperti #BlackLivesMatter, #ClimateStrike, atau #ReformasiDikorupsi menjadi cara bagi mereka untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan politik yang penting. Hashtag memungkinkan mereka untuk mengonsolidasi pendapat dan memobilisasi dukungan di seluruh dunia. Kampanye digital berbasis hashtag sering kali berhasil menggalang perhatian besar dari publik, dan Gen Z menggunakan ini untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan politik atau memperjuangkan perubahan sosial.

Respon politik Gen Z juga dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan teman sebaya (*peer-to-peer*) dan influencer di media sosial. Mereka lebih cenderung mendiskusikan isu politik dengan teman-teman mereka di kolom komentar, direct message, atau forum-forum online yang mereka ikuti. Hal ini membantu mereka untuk memperkuat atau memperbaharui pandangan mereka tentang suatu isu. Selain itu, influencer di media sosial, baik itu selebriti, aktivis, maupun figur publik dengan pengikut besar, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini politik Gen Z. Ketika influencer menyuarakan pendapat mereka terhadap suatu isu politik, hal ini sering kali mendorong Gen Z untuk mengambil sikap yang serupa atau setidaknya mempertimbangkan isu tersebut dengan lebih serius.

BAB III

RESPON GEN Z DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN MK TENTANG BATASAN USIA CAPRES/CAWAPRES 2024

Generasi Z, yang terdiri dari individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh dalam era digital yang penuh dengan akses informasi melalui internet dan media sosial. Kehadiran teknologi telah memengaruhi cara mereka berkomunikasi, berpikir, dan membentuk pandangan politik. Perkembangan teknologi dan internet yang pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik.

Salah satu peristiwa penting dalam ranah politik di Indonesia adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan umur calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan aturan-aturan politik, termasuk batasan umur calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Pada Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, di Ruang Sidang Pleno MK, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan terkait batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Keputusan ini dapat mempengaruhi cara Generasi Z memandang demokrasi dan proses politik di Indonesia. Sikap digital Generasi Z terhadap keputusan tersebut dapat tercermin melalui platform media sosial, di mana mereka aktif berdiskusi, berbagi pendapat, dan mengekspresikan pandangan mereka. Keputusan MK yang mengatur batasan umur calon pemimpin memiliki implikasi besar terhadap dinamika politik di Indonesia. Hal ini tidak hanya menciptakan diskursus di kalangan elit politik, tetapi juga memunculkan reaksi dan pandangan dari masyarakat, khususnya Generasi Z yang aktif di dunia digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai sikap digital Generasi Z terhadap Keputusan MK tentang batasan umur Capres/Cawapres.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji materi tentang ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Undang-Undang No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilu dan beberapa peraturan terkait menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 35 tahun. Namun, munculnya gugatan terkait ketentuan usia ini mengundang perhatian publik, termasuk di kalangan generasi muda, yang merasa bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator kapasitas seseorang untuk memimpin negara. Pemohon dalam perkara ini berargumen bahwa batas usia tersebut terlalu ketat, mengingat banyaknya tokoh muda yang memiliki potensi untuk memimpin negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pemilu 2024 memicu berbagai respon di kalangan Gen Z, khususnya di media sosial Instagram. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, Gen Z menunjukkan reaksi yang beragam terhadap keputusan ini, mulai dari dukungan, penolakan, hingga netralitas. Respon mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman politik, keterlibatan dalam diskusi publik, serta pengaruh tokoh-tokoh politik dan influencer di media sosial.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup mengejutkan dunia politik serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat dengan kepentingan keluarga. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, meski secara umur cawapres tersebut belum memenuhi syarat, tetapi bisa maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia.

Meski Mahkamah Konstitusi menolak soal usia, tetapi putusan tersebut memasukan syarat lain bagi yang di bawah usia 40 tahun, yakni pernah menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan termasuk Pilkada. Menurut MK tidak ingin dianggap secara vulgar memihak kepentingan keluarga Jokowi, tetapi substansi putusan itu jelas mengelabui penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat mengikuti kontestasi.

Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan gugatan ini mengulas berbagai perspektif tentang representasi politik dan keadilan bagi generasi muda. MK melihat bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan Pemilu adalah untuk

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tanpa memandang usia atau generasi. MK menyatakan bahwa usia bukanlah satu-satunya parameter untuk menilai kapasitas kepemimpinan, meskipun pengalaman dan kematangan politik juga merupakan faktor penting dalam menentukan kelayakan seorang kandidat. Selain itu, MK juga memerhatikan perkembangan politik yang semakin dinamis, di mana generasi muda yang terlibat dalam pemerintahan bisa membawa perspektif dan gagasan baru, yang penting untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa pembatasan usia capres-cawapres yang selama ini berlaku perlu ditinjau ulang, agar memberikan ruang lebih besar bagi kaum muda yang memiliki potensi kepemimpinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini lebih dari sekadar masalah politik, karena memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara UUD 1945, proses legislasi, dan penerapan aturan dalam konteks pemilu. Secara keseluruhan, keputusan ini menjadi titik balik yang signifikan dalam memperkuat demokrasi dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam politik negara. Hal ini juga menekankan pentingnya untuk meninjau kembali persyaratan calon pemimpin negara, agar dapat mengikuti perubahan dalam bidang politik, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, media sosial, terutama Instagram, telah menjadi saluran utama bagi Gen Z untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan mengungkapkan pandangan mereka terhadap isu-isu, termasuk dalam ranah politik. Instagram memberi mereka akses langsung ke berita, opini, serta tokoh-tokoh politik melalui fitur seperti story, post, dan reels, yang memfasilitasi diskusi politik yang lebih terbuka dan dinamis. Bagi Gen Z, Instagram lebih dari sekadar platform hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh informasi dan membentuk sikap terhadap peristiwa politik.

Peran Kaum Milenial dan Gen Z dalam politik dan proses demokrasi saat ini sering kali dianggap sebagai pelengkap dalam kontestasi politik, dengan suara mereka yang berpotensi dimanfaatkan untuk memenangkan Pemilu. Padahal, kelompok pemilih berusia 17-35 tahun menyumbang sekitar 55% dari total pemilih pada Pemilu 2019 (Survei Saiful Mujani Riset Consulting, 2019). Banyak di antara mereka yang melihat politik sebagai arena yang dipenuhi kepentingan sempit dan

lebih mengandalkan praktik politik instan. Beberapa juga merasa bahwa para aktor politik yang ada masih didominasi oleh kelompok konservatif, yang cenderung menggunakan cara-cara tradisional dan tidak menawarkan inovasi, hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Perspektif mereka tentang kontestasi politik lebih berfokus pada hasil akhir, yaitu menang atau kalah, tanpa melihat potensi untuk perubahan yang lebih berarti.

Media sosial merupakan salah satu bentuk teknologi informasi yang sangat efektif sebagai platform untuk interaksi dan pertukaran informasi, yang menjadikannya sangat populer di kalangan Generasi Milenial dan Gen Z (Saputro, 2022: 62-64). Generasi ini dikenal sebagai "digital native" karena mereka sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi, cepat beradaptasi, dan merasa nyaman menggunakan berbagai perangkat digital. Media sosial menjadi saluran utama bagi Milenial dan Gen Z untuk mengekspresikan diri, berbagi percakapan, pengalaman, serta aktivitas mereka. Namun, meskipun mereka sangat aktif di dunia maya, ada tantangan terkait daya saing dan partisipasi mereka dalam memperkuat demokrasi. Potensi besar populasi ini dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan generasi yang lebih kompetitif dan berkontribusi pada kemajuan demokrasi, tetapi juga memunculkan tantangan kependudukan, sehingga kebijakan pembangunan strategis perlu lebih memperhatikan peran mereka dalam memajukan demokrasi di Indonesia.

Saat ini, media sosial telah menjadi fenomena yang signifikan dalam dunia politik Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum, di mana media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi politik. Sebagai bagian dari media online atau media baru, keberadaan media sosial semakin diterima sebagai salah satu kemajuan teknologi yang digunakan untuk sosialisasi dan strategi politik, mengingat biaya yang relatif rendah dan akses yang tak terbatas. Penggunaan media sosial sebagai platform dialog politik telah terbukti efektif dalam berbagai kesempatan.

Perkembangan internet di Indonesia telah membuka peluang untuk berbagai aktivitas, salah satunya adalah melalui media sosial. Penggunaan media sosial kini semakin meluas, bahkan oleh tokoh-tokoh politik. Kemajuan komunikasi digital, terutama yang berbasis online, menjadikan media sosial sebagai sarana efektif

untuk promosi, termasuk dalam konteks politik. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya memiliki peran penting bagi politisi dalam membangun eksistensi mereka serta menciptakan kedekatan dengan publik secara virtual melalui unggahan foto dan video.

Pemilu 2024 diperkirakan akan sangat menarik karena partisipasi pemilihnya akan didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z (Gen Z). Kedua kelompok ini memiliki persentase populasi yang besar dalam struktur demografi Indonesia. Gen Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menyumbang sekitar 27,7% dari total populasi, sementara Milenial, yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996, mencakup sekitar 25,8% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS 2020). Selama dua dekade terakhir, struktur demografi Indonesia telah mengalami perubahan besar menjelang tercapainya bonus demografi pada tahun 2045. Kehadiran generasi Milenial dan Gen Z seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah banyak aspek kehidupan, sebuah era yang disebut sebagai disrupsi teknologi.

Generasi Z memanfaatkan media digital sebagai sumber utama untuk mengakses informasi, termasuk isu-isu sosial dan politik. Keterlibatan mereka dalam demokrasi dan politik di Indonesia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak, terutama oleh para politisi yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2024. Data dari bijakmemilih.id menunjukkan bahwa 55% atau sekitar 107 juta pemilih pada Pemilu 2024 adalah dari kalangan generasi muda, termasuk Generasi Z. Menurut Johnson & Johnson (2010), Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah tahun 1995 dan sering disebut sebagai "linkster generations" karena mereka terhubung dengan teknologi internet sejak lahir. Dengan tingginya tingkat aktivitas Generasi Z di dunia maya, kemampuan untuk memiliki literasi digital dan menggunakan media secara bijak sangat diperlukan oleh setiap individu. Salah satu keterampilan penting adalah kemampuan dalam menerima, menanggapi, dan mengelola isu-isu sosial yang berkembang di internet atau media sosial (Rakhman & Haryadi, 2019). Generasi Z di Indonesia telah menunjukkan partisipasi politik yang signifikan melalui media digital dan aksi-aksi protes di jalanan.

Dengan lebih dari satu miliar pengguna aktif, Instagram telah memainkan peran kunci dalam membentuk budaya populer, tren, dan opini publik. Platform ini tidak hanya mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi tetapi juga telah menjadi sumber berita, pendidikan, dan inspirasi bagi banyak penggunanya. Instagram juga menjadi ruang bagi generasi muda, khususnya Gen Z, untuk mengekspresikan diri, berpartisipasi dalam dialog sosial dan politik, dan membentuk identitas digital mereka.

Penggunaan Instagram oleh Gen Z, khususnya dalam konteks politik dan sosial, menunjukkan bagaimana platform ini telah melampaui sekadar aplikasi berbagi foto. Menjadi alat yang kuat untuk aktivisme, kampanye sosial, dan partisipasi politik, Instagram membuka jalan baru untuk diskusi publik dan keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi. Melalui Instagram, Gen Z tidak hanya dapat mengakses informasi tentang isu-isu penting tetapi juga memiliki platform untuk memengaruhi perubahan sosial dan politik. Kebijakan ini telah memicu diskusi dan debat di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan Gen Z yang aktif berpartisipasi dalam berbagai platform media sosial, termasuk Instagram. Instagram, sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer di kalangan Gen Z, menyediakan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan pendapat, pandangan, dan sikap mereka terhadap berbagai isu, termasuk keputusan MK tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Melalui platform ini, Gen Z dapat berbagi informasi, mengorganisir gerakan, dan memengaruhi opini publik. Seperti yang dikatakan oleh Mahasiswa Universitas Diponegoro menyatakan pernyataan bahwa mendapatkan informasi terkait keputusan ini dari media sosial instagram yaitu Saffana mengungkapkan bahwa:

“Saya mengetahui keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres/cawapres melalui beberapa unggahan di Instagram, yang muncul di beranda saya dari akun media berita. Informasi pertama kali saya temukan melalui postingan infografis yang menjelaskan poin-poin utama dari keputusan tersebut, diikuti oleh diskusi di kolom komentar yang memberikan berbagai sudut pandang. Setelah melihatnya, saya melakukan pengecekan lebih lanjut di sumber berita resmi untuk memastikan keakuratan informasi.” (Wawancara dengan Saffana selaku Mahasiswa UNDIP, 13 Oktober 2024)

Studi tentang sikap digital Gen Z terhadap keputusan MK tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden di Instagram menjadi relevan karena memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana generasi ini bereaksi terhadap kebijakan politik penting dan bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi persepsi dan partisipasi politik mereka. Dengan memahami sikap digital Gen Z, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang arah politik masa depan dan memperkuat partisipasi demokratis di Indonesia.

Banyak pengguna Instagram, baik yang mendukung maupun mengkritik keputusan MK, menggunakan kolom komentar sebagai ruang untuk saling mengedukasi. Mereka seringkali membagikan artikel, video, atau postingan lain yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai dampak keputusan MK terhadap politik Indonesia. Diskusi ini sering kali melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan ini, serta bagaimana calon-calon muda akan mempersiapkan diri mereka untuk memimpin negara. Tidak hanya berhenti pada komentar-komentar, beberapa pengguna Instagram juga mengajak teman-teman mereka untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilu 2024. Mereka berpendapat bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi generasi muda untuk lebih berpartisipasi dalam politik, baik dengan cara memilih atau bahkan mendukung calon-calon muda yang memiliki visi yang sejalan dengan nilai-nilai mereka. Penggunaan platform Instagram untuk berbagi informasi dan mendorong partisipasi pemilih muda semakin berkembang dalam percakapan ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh influencer di Instagram sangat besar dalam membentuk opini Gen Z. Beberapa influencer muda yang memiliki pengikut yang banyak ikut berperan dalam percakapan ini, baik dengan memberikan dukungan terhadap keputusan MK atau dengan mengkritik kebijakan tersebut. Mereka memanfaatkan platform mereka untuk mengajak pengikutnya berbicara lebih banyak tentang pemilu dan pentingnya keterwakilan pemimpin muda. Beberapa influencer bahkan mengadakan kampanye di kolom komentar, mengajak followers mereka untuk mendukung calon muda yang mereka nilai potensial untuk memimpin Indonesia. Seperti yang dikatakan Mahasiswa Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa pengaruh influencer di Instagram

sangat besar dalam membentuk opini Gen Z , Zakiya Huridan mengungkapkan bahwa :

“Saya mengikuti beberapa influencer, selebriti, dan tokoh politik di Instagram yang membahas keputusan ini. Pengaruh mereka cukup besar terhadap pandangan saya, terutama karena mereka sering memberikan perspektif yang berbeda atau mendalam tentang isu tersebut. Ketika mereka menjelaskan keputusan MK dengan sudut pandang yang relevan bagi generasi muda, saya jadi lebih memahami dampaknya dan lebih tertarik untuk terlibat dalam diskusi.” (Wawancara dengan Zakiya Huridan selaku Mahasiswa UGM , 19 Oktober 2024)

Dengan menggunakan hashtag yang berkaitan dengan kampanye, mereka berharap dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pengikut mereka mengenai pentingnya memilih pemimpin muda yang memiliki visi yang lebih segar dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Opini yang dibentuk oleh influencer ini seringkali diikuti dengan diskusi lebih lanjut di kolom komentar oleh pengikut mereka. Dengan begitu, percakapan ini semakin meluas dan memperkaya wacana tentang politik di kalangan generasi muda, membuka ruang bagi lebih banyak suara dari berbagai pihak untuk didengar.

3.1. Percakapan Gen Z di Media Sosial Instagram terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres/Cawapres

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan batas usia minimal untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024 menjadi topik yang hangat dibicarakan di kalangan generasi Z (Gen Z), khususnya di media sosial Instagram. Media sosial seperti Instagram telah menjadi platform utama bagi Gen Z untuk mengekspresikan pandangan mereka, terlibat dalam diskusi politik, dan memperluas wacana tentang isu-isu penting, termasuk politik.

Respon Positif Gen Z terhadap Keputusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah membuat sebuah keputusan yang signifikan dengan mengubah persyaratan usia bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu. Putusan ini menimbulkan

perdebatan panjang dan memberi dimensi baru dalam dinamika politik serta hukum konstitusional di Indonesia. Pada Senin, 16 Oktober, MK memutuskan bahwa batas usia minimal 40 tahun yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqib Birru, seorang mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, yang mempertanyakan ketentuan tersebut. Dengan putusan ini, MK membuka kesempatan bagi calon di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman menjabat di posisi negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk sebagai kepala daerah, untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Ini menjadi titik penting dalam keputusan tersebut, yang memberi ruang bagi calon muda yang memiliki pengalaman politik. Sebagian besar respon Gen Z yang ditemukan di media sosial menunjukkan pandangan positif terhadap perubahan batas usia capres-cawapres. Gen Z, yang tumbuh dalam dunia digital dan sering terpapar pada informasi yang cepat berubah, cenderung mendukung pemimpin yang dapat merespons isu-isu global dengan cepat dan efektif. Mereka percaya bahwa generasi muda lebih peka terhadap perkembangan teknologi, hak digital, dan isu sosial yang relevan dengan zaman sekarang.

Di Instagram, banyak pengguna Gen Z yang menggunakan hashtag seperti #PemimpinMuda, #CapresMuda, dan #BatasUsiaCapres untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap keputusan MK. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi tokoh muda untuk terlibat dalam proses politik dan memberikan perspektif baru dalam pemerintahan. Beberapa influencer dan tokoh muda di Instagram bahkan memanfaatkan platform mereka untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang pentingnya keterwakilan anak muda dalam politik, mengajak pengikut mereka untuk lebih aktif terlibat dalam pemilu dan mendukung calon presiden dan wakil presiden yang lebih muda. Menurut Gen Z, pemimpin muda lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh generasi mereka, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dengan dibukanya kesempatan bagi capres-cawapres muda, mereka merasa lebih terwakili dalam proses politik dan lebih percaya bahwa perubahan yang mereka inginkan bisa terwujud.

Respon Negatif dan Kekhawatiran tentang Keputusan MK

Namun, tidak semua respon dari Gen Z terhadap keputusan MK ini bersifat positif. Beberapa pengguna Instagram juga menunjukkan kekhawatiran terkait dengan kesiapan para calon muda untuk memimpin negara. Mereka menganggap bahwa meskipun usia muda membawa semangat baru, pengalaman tetap merupakan elemen penting dalam kepemimpinan politik. Dalam beberapa unggahan, mereka menyatakan bahwa meskipun pemimpin muda memiliki potensi, tantangan politik yang kompleks seperti kebijakan luar negeri, ekonomi global, dan pengelolaan pemerintahan membutuhkan kedewasaan dan pengalaman yang lebih matang.

Selain itu, ada juga kritik terhadap keputusan MK yang dianggap membuka peluang bagi individu dengan ambisi politik pribadi yang mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup dalam dunia politik. Beberapa respon Gen Z yang skeptis terhadap keputusan ini khawatir bahwa menghapus batasan usia bisa menyebabkan calon-calon yang kurang siap untuk menghadapi tantangan politik, yang akhirnya bisa merugikan kualitas pemerintahan. Respon Gen Z terhadap keputusan MK ini mencerminkan perubahan yang terjadi dalam politik Indonesia. Keputusan MK yang membuka kesempatan bagi calon muda untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 tidak hanya mengubah dinamika politik, tetapi juga menunjukkan bahwa politik Indonesia mulai lebih inklusif dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi lebih besar dalam proses pemerintahan.

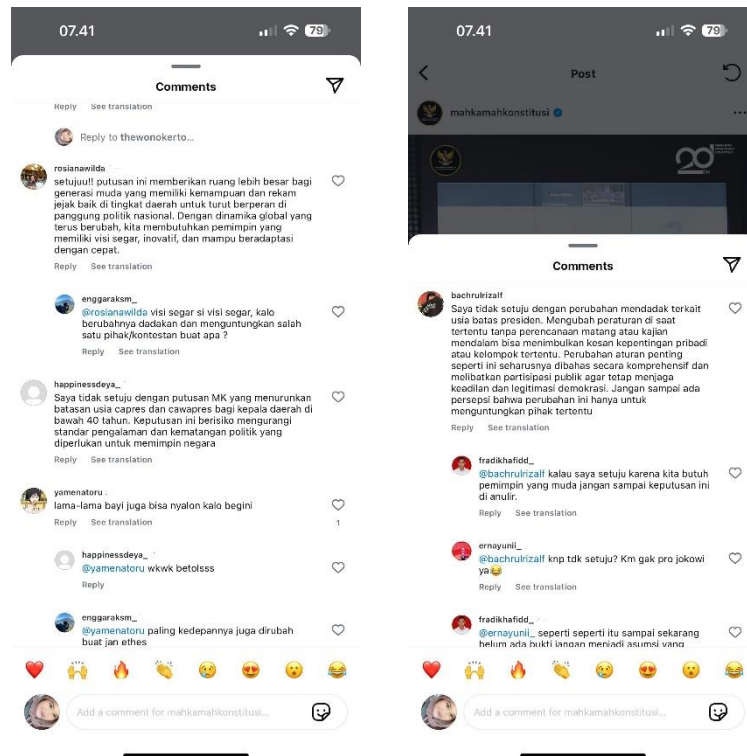
Bagi Gen Z, keputusan ini adalah langkah yang baik dalam menciptakan peluang bagi pemimpin yang lebih relevan dengan isu-isu kontemporer dan lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Namun, keputusan ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun semangat dan ide baru dari generasi muda sangat penting, pengalaman politik dan kemampuan untuk mengelola negara dengan bijaksana tetap menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemimpin. Respon Gen Z terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres-cawapres menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mencerminkan keragaman pendapat di kalangan generasi muda. Sebagian besar

mendukung keputusan ini karena mereka melihatnya sebagai peluang bagi pemimpin muda untuk terlibat dalam politik nasional. Namun, ada juga kritik yang menekankan pentingnya pengalaman dalam kepemimpinan. Dalam hal ini, media sosial, khususnya Instagram, menjadi ruang penting bagi Gen Z untuk berdiskusi dan berbagi opini mengenai politik, serta menunjukkan keterlibatan mereka dalam menentukan masa depan kepemimpinan Indonesia. Keputusan MK ini membuka pintu bagi lebih banyak tokoh muda, namun juga menuntut masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin negara.

3.1.1. Percakapan Gen Z di Akun Instagram Mahkamah Konstitusi

Dalam hal ini, respon Gen Z terhadap keputusan MK mengenai batas usia capres-cawapres bisa dilihat dari cara mereka menggunakan Instagram untuk menyuarakan pandangan mereka. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan platform ini untuk mengungkapkan dukungan terhadap keputusan tersebut, dengan alasan bahwa hal ini membuka peluang bagi pemimpin muda untuk terlibat dalam politik nasional. Namun, tidak sedikit juga yang mengkritik keputusan ini, dengan pandangan bahwa meskipun usia muda bisa membawa semangat baru, pengalaman politik tetap menjadi faktor yang tak kalah penting dalam kepemimpinan.

Gambar 3.1. Percakapan Gen Z di Kolom Komentar akun Instagram MK



Sumber: Instagram Mahkamah Konstitusi

Percakapan Gen Z di kolom komentar akun Instagram Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat dilihat sebagai sebuah dinamika yang mencerminkan beragam pandangan, baik dukungan maupun kritik terhadap putusan MK. Gen Z, yang dikenal aktif dan kritis dalam menyuarakan pendapat, terutama di platform media sosial, memperlihatkan respons yang beragam terhadap keputusan penting ini.

Sebagian besar percakapan yang muncul di kolom komentar Instagram MK dari kalangan Gen Z menunjukkan kekhawatiran atau bahkan kritik terhadap keputusan MK ini. Kritik ini lebih banyak berfokus pada kesiapan dan pengalaman para calon muda dalam mengelola negara, serta potensi munculnya calon-calon dengan ambisi pribadi yang mungkin belum memadai dalam segi kepemimpinan. Sebagian pengguna mengingatkan bahwa meskipun semangat dan ide baru dari generasi muda sangat dibutuhkan, pengalaman tetap menjadi faktor yang sangat penting dalam dunia politik. Mereka khawatir jika calon presiden atau wakil presiden yang lebih muda tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam

menangani masalah-masalah politik yang kompleks, baik di dalam negeri maupun dalam konteks internasional. Pengguna Gen Z yang mengkritik keputusan ini sering mengungkapkan bahwa tanpa pengalaman yang matang, seorang pemimpin bisa kesulitan menghadapi tantangan besar yang dihadapi negara. Selain itu, ada juga yang khawatir bahwa keputusan MK membuka peluang bagi individu yang lebih berfokus pada ambisi pribadi daripada kepentingan rakyat. Mereka berpendapat bahwa meskipun seseorang bisa saja tampak muda dan penuh energi, tanpa rekam jejak yang memadai dalam dunia politik, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan nasional. Seperti yang dikatakan oleh Mahasiswa Universitas Tidar menyatakan pernyataan tidak setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Batasan Usia Capres/Cawapres pada kolom komentar akun Instagram Mahkamah Konstitusi yaitu Enggar Adi mengungkapkan bahwa :

“Menurut pendapat saya, saya pribadi tidak setuju bahwa keputusan ini relevan atau berpengaruh bagi masa depan politik Indonesia, terutama bagi generasi muda. Tanpa dukungan sistemik seperti partai politik yang bersedia memberi ruang dan peluang, keputusan ini tidak akan membawa perubahan signifikan dalam representasi politik generasi muda. Akhirnya, perubahan kebijakan yang mendasar diperlukan untuk mengatasi isu-isu yang lebih kompleks yang dihadapi oleh generasi muda.” (Wawancara dengan Enggar Adi selaku Mahasiswa Untidar, Sabtu 5 Oktober 2024)

Namun, ada juga komentar dari Gen Z yang mengungkapkan dukungan terhadap keputusan tersebut, terutama karena membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat lebih jauh dalam politik. Banyak pengguna yang merasa bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pemimpin muda yang inovatif dan berpikiran progresif untuk masuk dalam arena politik, yang selama ini lebih banyak didominasi oleh generasi yang lebih tua.

Pengguna Gen Z yang mendukung keputusan MK sering kali mengungkapkan harapan mereka agar pemimpin muda dapat membawa perubahan positif. Mereka berpendapat bahwa generasi muda memiliki pandangan yang lebih segar terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan ketidaksetaraan sosial. Dalam komentar-komentar mereka, mereka menggunakan

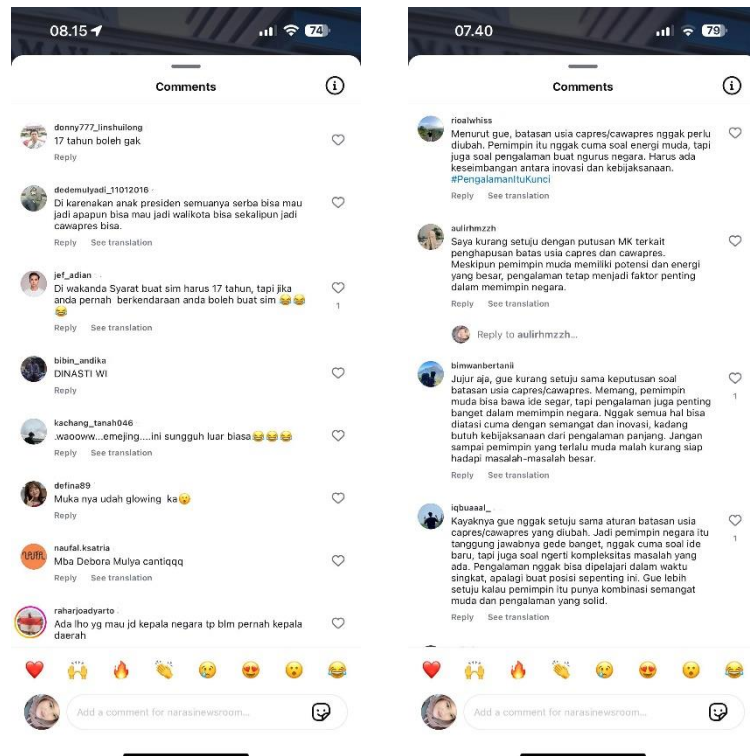
tagar seperti #PemimpinMuda dan #CapresMuda untuk menekankan bahwa keputusan MK memberikan peluang besar bagi figur muda untuk lebih terlibat dalam proses politik, termasuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Banyak dari mereka yang juga merasa bahwa keputusan ini sangat penting untuk menciptakan keterwakilan yang lebih adil di pemerintahan. Gen Z merasa bahwa suara mereka, sebagai generasi yang aktif di dunia digital dan yang sering menjadi agen perubahan sosial, perlu didengar lebih banyak di tingkat pemerintahan. Mereka berharap bahwa dengan adanya keputusan MK ini, lebih banyak tokoh muda yang memiliki potensi untuk memimpin negara, bukan hanya berdasarkan usia, tetapi juga dengan semangat dan ide-ide segar yang relevan dengan zaman.

Salah satu karakteristik percakapan Gen Z di kolom komentar Instagram MK adalah keterbukaan dalam berbagi pendapat dan interaksi yang progresif. Sebagian besar percakapan tersebut berlangsung dengan cara yang konstruktif, meskipun ada perbedaan pandangan yang tajam. Banyak dari mereka yang saling mengajak untuk lebih kritis dan terlibat dalam diskusi politik, bahkan dengan cara menyarankan untuk tetap mencari informasi yang lebih mendalam tentang calon-calon pemimpin yang akan bertarung di Pemilu 2024.

3.1.2. Percakapan Gen Z di Akun Instagram Narasi Newsroom

Percakapan Gen Z di akun Instagram Narasi Newsroom mencerminkan sikap kritis dan progresif terhadap isu-isu sosial dan politik. Gen Z, yang dikenal sebagai generasi yang melek teknologi dan aktif di media sosial, sering terlibat dalam diskusi yang mendalam di kolom komentar akun ini, terutama terkait berita-berita yang sedang hangat dibahas. Percakapan di kolom komentar akun Instagram Narasi News terkait dengan putusan MK mengenai batasan usia capres dan cawapres kemungkinan besar mencerminkan dinamika sikap dan pandangan yang beragam dari Gen Z. Sebagai generasi yang aktif dalam media sosial dan sangat peduli dengan isu-isu sosial-politik, Gen Z cenderung memberikan respon yang kritis, terbuka, dan berbasis pada perspektif segar yang mereka miliki.

Gambar 3.2. Percakapan Gen Z di Kolom Komentar akun Instagram Narasi Newsroom



Sumber: Instagram Narasi Newsroom

Banyak pengguna Gen Z di Instagram Narasi Newsroom menunjukkan kesadaran politik yang tinggi. Mereka tidak hanya mengomentari berita, tetapi juga memberikan analisis atau pandangan pribadi terkait peristiwa yang sedang terjadi. Isu-isu seperti, hak asasi manusia, kebijakan publik, dan pemilihan umum sering memicu diskusi yang hidup di kolom komentar. Misalnya, ketika Narasi Newsroom memposting tentang kebijakan pemerintah atau keputusan Mahkamah Konstitusi, komentar-komentar dari Gen Z cenderung penuh dengan perspektif yang beragam. Beberapa mendukung keputusan tersebut, sementara yang lain menyuarakan kritik, sering kali dilengkapi dengan alasan dan data yang mereka peroleh dari sumber lain. Gen Z di akun ini juga sering terlibat dalam diskusi tentang isu-isu sosial, seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, dan hak-hak minoritas. Mereka mengajak pengguna lain untuk lebih peduli dan mengambil tindakan nyata, sering kali dengan menyarankan kampanye atau gerakan tertentu yang relevan dengan isu tersebut.

Narasi Newsroom dikenal sebagai media yang sering mengangkat suara generasi muda dan isu-isu yang relevan bagi mereka. Ini membuat akun Instagram mereka menjadi salah satu platform bagi Gen Z untuk mengekspresikan opini dan

menemukan komunitas yang berpikiran sama. Dalam beberapa kasus, komentar-komentar Gen Z di Narasi Newsroom bahkan berfungsi untuk memobilisasi aksi atau partisipasi lebih lanjut, seperti ikut serta dalam petisi atau kampanye sosial. Mereka juga sering berbagi informasi yang mereka temukan di luar platform untuk mendukung atau membantah sebuah berita.

Sebagian besar komentar dari Gen Z mungkin menunjukkan dukungan terhadap keputusan MK, yang membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik Indonesia. Mereka melihat ini sebagai kesempatan bagi pemimpin muda untuk membawa ide-ide baru dan perspektif yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Seperti yang dikatakan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang menyatakan pernyataan setuju dengan analisis atau pandangan pribadi terkait peristiwa yang sedang terjadi yaitu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Batasan Usia Capres/Cawapres pada kolom komentar akun Instagram Mahkamah Konstitusi yaitu Eka Rosiana mengungkapkan bahwa :

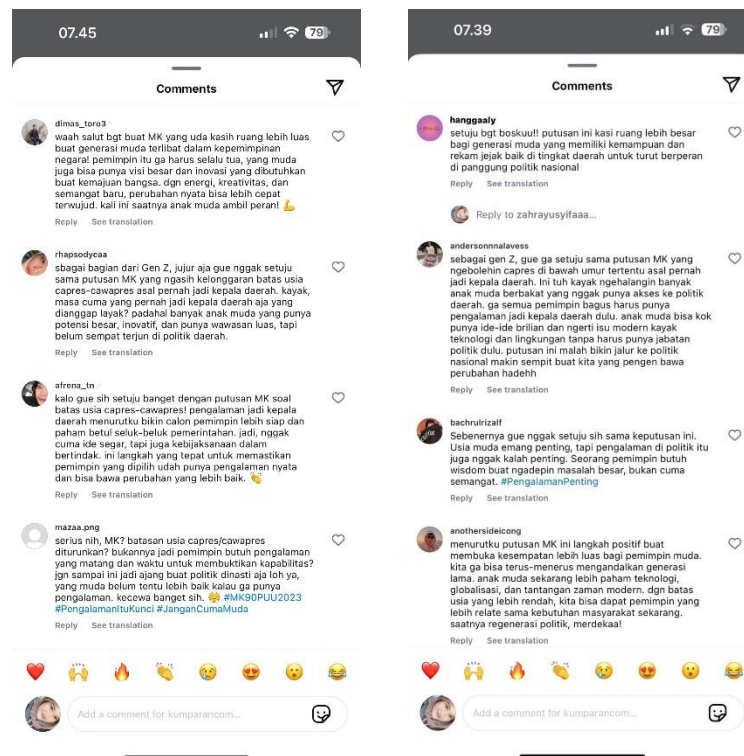
“Saya setuju dengan putusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres. Keputusan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam memimpin bangsa. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pemimpin muda memiliki perspektif yang lebih relevan dan mampu memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan batas usia capres/cawapres, kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam kepemimpinan nasional menjadi lebih terbuka. Ini bisa mendorong keterwakilan politik yang lebih inklusif, mengingat banyak anak muda yang memiliki ide-ide segar dan visi untuk perubahan muda yang kompeten dan berintegritas!”
(Wawancara dengan Eka Rosiana selaku Mahasiswa Unnes, Rabu 9 Oktober 2024)

Gen Z cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai dan sering kali disertai dengan meme, humor, atau tagar yang relevan. Namun, meskipun gaya komunikasi ini lebih ringan, percakapan yang terjadi tetap penuh makna dan menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang isu-isu besar. Humor sering kali digunakan untuk menyampaikan kritik dengan cara yang lebih mudah diterima. Misalnya, mereka membuat komentar bernada sarkasme tentang kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau lambannya penanganan pemerintah terhadap suatu masalah. Percakapan Gen Z di akun Instagram Narasi Newsroom

menunjukkan betapa generasi ini sangat terlibat dalam diskusi sosial dan politik, dengan gaya komunikasi yang kreatif namun tetap serius. Mereka menggunakan platform ini untuk berdialog, berbagi informasi, dan memobilisasi gerakan sosial, memperlihatkan bahwa media sosial menjadi ruang penting bagi mereka untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam perubahan.

3.1.3. Percakapan Gen Z di Akun Instagram Kumparancom

Gambar 3.3. Percakapan Gen Z di Kolom Komentar akun Instagram Kumparan



Sumber: Instagram Kumparan

Percakapan Gen Z di akun Instagram Kumparancom mengenai putusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres dapat menggambarkan variasi pandangan yang muncul dari generasi muda yang terlibat dalam dunia politik dan media sosial. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi, Gen Z cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, tetapi juga sangat kritis terhadap hal-hal yang memengaruhi masa depan mereka. Percakapan Gen Z di akun Instagram Kumparancom terkait dengan putusan MK mengenai batasan usia capres dan cawapres biasanya

mencerminkan campuran antara antusiasme, kritik, dan harapan terhadap perubahan dalam dunia politik Indonesia. Sebagai generasi yang sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial, Gen Z cenderung aktif mengungkapkan pendapat mereka dalam bentuk komentar yang lebih santai, namun tetap kritis dan berbobot.

Sebagian besar Gen Z yang berkomentar di Instagram Kumparancom cenderung menyambut positif keputusan MK mengenai batasan usia capres dan cawapres yang lebih fleksibel, khususnya perihal usia muda. Mereka melihat keputusan ini sebagai bentuk kemajuan dan peluang bagi generasi muda untuk lebih terlibat dalam politik. Seperti yang dikatakan oleh Zakiya Huridan Mahasiswa Universitas Gajah Mada tentang usia muda memberikan dampak positif bagi keputusan ini, nama menyatakan bahwa :

“Sebelum keputusan MK, saya berpandangan bahwa batasan usia capres/cawapres perlu diperhatikan untuk memastikan pengalaman yang cukup dalam kepemimpinan. Namun, setelah keputusan tersebut, saya mulai melihat potensi positif dari memperbolehkan usia yang lebih muda untuk mencalonkan diri. Meski begitu, ada juga risiko jika kandidat muda kurang pengalaman dalam mengelola tantangan politik. Secara keseluruhan, saya kurang percaya bahwa usia yang lebih muda dapat memberikan dampak positif asalkan diimbangi dengan komitmen dan kualitas kepemimpinan yang baik.” (Wawancara dengan Zakiya Huridan selaku Mahasiswa UGM, 19 Oktober 2024)

Di mata mereka, keterlibatan aktif dalam politik adalah cara untuk memajukan negara dengan ide-ide segar dan relevansi terhadap perkembangan zaman. Selain itu, banyak komentar yang menyoroti pentingnya keterwakilan generasi muda dalam struktur politik Indonesia. Gen Z merasa suara mereka sering kali terabaikan dalam pengambilan keputusan besar. Oleh karena itu, mereka berharap keputusan ini bisa menjadi titik balik bagi para pemimpin muda untuk terlibat lebih aktif dalam membuat kebijakan yang mencerminkan aspirasi generasi mereka.

Percakapan Gen Z di akun Instagram Kumparancom tentang putusan MK mengenai batasan usia capres dan cawapres sangat beragam, mulai dari dukungan penuh terhadap kesempatan bagi pemimpin muda, hingga kritik tentang kesiapan

mereka. Ada juga diskusi mengenai keterwakilan generasi muda dalam politik, serta harapan akan perubahan dalam sistem politik Indonesia. Di samping itu, Gen Z tidak ragu menggunakan humor dan meme untuk mengkritik atau mendukung, menjadikan percakapan ini penuh dinamika dan kreatifitas. Dengan cara ini, mereka aktif berpartisipasi dalam diskusi yang tidak hanya berfokus pada politik semata, tetapi juga pada masa depan mereka di bawah kepemimpinan yang baru.

3.2. Faktor yang memengaruhi pendapat Gen Z di Media Sosial Instagram Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres/Cawapres

Media sosial, terutama Instagram, telah menjadi platform utama bagi generasi muda, khususnya Gen Z, untuk mengakses informasi, mengekspresikan pandangan, dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Sebagai generasi yang tumbuh dalam era digital, Gen Z sangat terhubung dengan teknologi dan memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi informasi secara cepat dan praktis melalui perangkat mobile. Salah satu isu politik yang telah menarik perhatian Gen Z dalam beberapa waktu terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024. Ada beberapa faktor yang memengaruhi bagaimana Gen Z merespons dan menyuarakan pendapat mereka tentang putusan MK di media sosial, khususnya Instagram.

Pendapat Gen Z di media sosial, khususnya Instagram, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia capres/cawapres sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi, Gen Z memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap berbagai informasi politik, yang membuat mereka lebih aktif dalam merespons isu-isu penting seperti keputusan MK tersebut. Salah satu faktor utama yang memengaruhi pandangan mereka adalah akses terhadap informasi. Dengan kemudahan mendapatkan berita melalui Instagram, Gen Z dapat segera mengetahui perkembangan terkait putusan MK dan menyaring informasi dari berbagai sumber,

baik itu media mainstream maupun sumber yang lebih independen, seperti influencer dan tokoh publik yang mereka ikuti.

Selain itu, pengaruh opini yang beredar di media sosial turut membentuk pendapat mereka. Instagram, yang memiliki karakter visual dan interaktif, memungkinkan informasi disebarkan dengan cara yang menarik, seperti melalui infografis, meme, atau video pendek. Konten semacam ini memiliki daya tarik yang besar bagi Gen Z, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh cara penyampaian opini yang kreatif dan mudah dicerna. Di platform ini, mereka juga sering kali terlibat dalam diskusi politik dengan teman-teman atau komunitas online yang memiliki pandangan serupa atau berbeda, yang semakin memperkaya perspektif mereka.

Nilai-nilai politik yang dianut oleh Gen Z juga memainkan peran penting dalam membentuk pendapat mereka terhadap keputusan MK. Gen Z dikenal sebagai generasi yang lebih progresif dan menginginkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan politik. Banyak dari mereka yang mendukung adanya peluang lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik, sehingga mereka cenderung melihat batasan usia capres/cawapres sebagai hambatan terhadap partisipasi aktif mereka dalam pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan MK yang menetapkan batasan usia minimal bisa menjadi titik perdebatan yang mengundang reaksi beragam di kalangan Gen Z.

Generasi Z, yang tumbuh dalam era digital, dikenal sangat aktif dalam menyuarakan pendapat mereka, terutama di platform media sosial seperti Instagram. Hal ini berlaku juga terkait dengan isu-isu politik, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. Keputusan MK yang mengubah batas usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun membuka peluang bagi generasi muda untuk lebih berpartisipasi dalam politik nasional. Namun, pendapat Gen Z di media sosial mengenai keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat sosial, psikologis, politik, maupun digital.

3.2.1. Pendidikan dan Literasi Digital

Salah satu faktor utama yang memengaruhi pendapat Gen Z tentang putusan MK adalah tingkat pendidikan dan literasi digital. Sebagai generasi yang sangat terbiasa dengan teknologi dan informasi, mereka cenderung mengakses berbagai sumber informasi secara cepat dan luas. Banyak dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, terutama dalam hal pemahaman terhadap isu-isu politik dan hukum. Hal ini membuat mereka lebih kritis dalam menilai keputusan-keputusan politik seperti yang dikeluarkan oleh MK. Di sisi lain, literasi digital yang tinggi memungkinkan Gen Z untuk memahami informasi secara lebih mendalam, termasuk mengakses artikel atau video yang menjelaskan proses hukum di balik putusan MK tersebut. Misalnya, mereka bisa mengeksplorasi lebih lanjut tentang alasan di balik perubahan batas usia tersebut, apa dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan dinamika politik di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Eka Rosiana selaku Mahasiswa Universitas Negeri Semarang menyatakan bahwa :

“Cara paling efektif untuk meningkatkan kemampuan Gen Z dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid di Instagram adalah melalui pendidikan literasi digital yang lebih mendalam. Literasi digital sangat penting dalam membantu saya memahami keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia capres/cawapres. Dengan keterampilan literasi digital, saya dapat mengevaluasi sumber informasi yang saya temui di media sosial dan berita online, sehingga saya bisa membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid. Selain itu, literasi digital memungkinkan saya untuk menemukan berbagai perspektif dan analisis terkait keputusan tersebut, yang membantu saya membentuk pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap isu-isu politik yang relevan.”
(Wawancara dengan Eka Rosiana selaku Mahasiswa Unnes, Rabu 9 Oktober 2024)

Namun, literasi digital juga memiliki sisi negatif, di mana sebagian dari Gen Z mungkin terjebak dalam berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap putusan MK, sehingga mempengaruhi cara mereka berkomentar atau memberikan pendapat di media sosial. Pendidikan juga berperan dalam memahami isu-isu politik dan hukum. Dengan pengetahuan yang baik tentang proses hukum dan politik, mereka lebih mampu untuk menganalisis keputusan MK secara kritis. Misalnya, mereka dapat

mengkaji dampak perubahan batas usia capres dan cawapres terhadap dinamika politik dan kepemimpinan di Indonesia, serta mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut akan membawa perubahan positif bagi generasi muda. Seperti yang dikatakan oleh Mahasiswa Universitas Tidar, Enggar Adi mengatakan bahwa :

“Saya percaya bahwa pendidikan yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Gen Z dalam menyuarakan pendapat mereka di media sosial. Pendidikan yang berkualitas membekali mereka dengan keterampilan literasi digital yang penting untuk menilai dan menyaring informasi, serta kemampuan untuk menyampaikan argumen secara kritis dan konstruktif. Selain itu, pendidikan yang baik juga membangun pemahaman terhadap isu-isu sosial dan politik, yang memungkinkan Gen Z untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan wawasan yang lebih luas dan berbasis fakta. Dengan dasar pendidikan yang kuat, mereka lebih sadar akan etika dan tanggung jawab dalam berpendapat, yang berkontribusi pada terciptanya diskusi yang lebih produktif dan positif di platform media sosial.” (Wawancara dengan Enggar Adi selaku Mahasiswa Untidar, Sabtu 5 Oktober 2024)

Secara keseluruhan, pendapat Gen Z di media sosial Instagram terkait putusan MK mengenai batasan usia capres/cawapres dipengaruhi oleh akses informasi yang cepat, pengaruh opini yang beredar di media sosial, nilai-nilai politik yang mereka anut, dan jaringan sosial yang mereka bangun di platform tersebut. Faktor-faktor ini membentuk sikap dan pandangan mereka, serta menunjukkan betapa pentingnya media sosial dalam membentuk dinamika opini politik di kalangan generasi muda.

3.2.2. Pengaruh Media Sosial dan Jaringan Sosial

Gen Z dikenal sangat terhubung dengan jaringan sosial mereka melalui platform media sosial. Jaringan sosial yang luas dan terhubung langsung dengan teman-teman sebaya memungkinkan mereka untuk saling bertukar pendapat dan memperkuat opini mereka. Di Instagram, platform yang visual dan interaktif, mereka sering terlibat dalam percakapan dengan mengikuti akun-akun yang memiliki pengaruh, baik itu akun berita seperti Mahkamah Konstitusi atau akun influencer politik. Tanggapan mereka terhadap putusan MK sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang berkembang di dalam kelompok mereka. Jika teman-teman atau influencer yang mereka ikuti mendukung keputusan tersebut, mereka cenderung ikut mendukung. Sebaliknya, jika mayoritas teman atau influencer

mereka mengkritik keputusan tersebut, mereka mungkin juga akan memberikan pendapat yang lebih kritis. Ini menggambarkan bagaimana media sosial membentuk dan memperkuat pandangan seseorang dalam konteks sosial yang lebih luas. Seperti yang dikatakan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Eka Rosiana menyatakan bahwa:

“Saya merasa bahwa jaringan politik di Instagram dapat berfungsi sebagai ruang yang efektif untuk bertukar pandangan politik tentang isu-isu besar, seperti batas usia capres/cawapres, tetapi dengan beberapa keterbatasan. Instagram sebagai platform visual memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan menarik, terutama melalui infografis, video pendek, dan konten yang mudah dicerna. Hal ini menjadikan Instagram sebagai tempat di mana Gen Z, yang merupakan generasi digital native, dapat dengan mudah mengakses dan berdiskusi tentang isu-isu politik yang sedang hangat dibicarakan.” (Wawancara dengan Eka Rosiana selaku Mahasiswa Unnes, Rabu 9 oktober 2024)

Selain itu, banyak Gen Z yang mengikuti akun-akun yang berbagi pandangan atau analisis politik, yang dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai topik-topik seperti reformasi politik, partisipasi pemilih muda, dan keberagaman dalam politik. Akun seperti Kumparancom, NarasiNews, atau Mahkamah Konstitusi sendiri turut berperan dalam menyajikan informasi yang memengaruhi cara berpikir dan sikap mereka terhadap keputusan-keputusan politik yang penting.

Pengaruh media sosial dan jaringan sosial di Instagram sangat besar dalam membentuk opini publik tentang batasan usia capres dan cawapres. Sebagai platform berbasis visual yang digunakan oleh berbagai kelompok usia, terutama Gen Z dan milenial, Instagram memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, memicu diskusi, dan membentuk pandangan politik terkait isu-isu penting seperti keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu kekuatan utama Instagram adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres/cawapres diumumkan, informasi tersebut dengan cepat beredar melalui postingan, story, dan reels. Berbagai akun berita, influencer politik, dan komunitas aktivis dengan cepat membagikan konten yang membahas keputusan tersebut, lengkap dengan analisis,

infografis, atau meme yang memudahkan audiens untuk memahami isu ini. Penyebaran informasi secara cepat ini memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam percakapan politik yang relevan dengan waktu.

Jaringan sosial di Instagram memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, yang membantu membentuk opini publik. Diskusi tentang batas usia capres/cawapres sering terjadi di kolom komentar akun berita, influencer, atau tokoh politik, di mana pengguna berbagi pandangan, setuju atau tidak setuju, dan mendiskusikan implikasi dari keputusan tersebut. Jaringan sosial di Instagram juga menciptakan komunitas dengan pandangan politik serupa, yang memperkuat opini melalui interaksi antar-pengguna. Semakin sering sebuah pandangan dibagikan dan didiskusikan dalam komunitas ini, semakin besar pengaruhnya terhadap pembentukan opini kolektif.

Media sosial seperti Instagram menjadi platform penting bagi Gen Z untuk meningkatkan kesadaran politik mereka. Melalui jaringan sosial di Instagram, mereka tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang proses politik dan implikasinya terhadap masa depan mereka. Dalam konteks batas usia capres/cawapres, Gen Z dapat menggunakan Instagram untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, baik dari tokoh politik, aktivis, maupun dari sesama pengguna. Diskusi ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan opini yang lebih terinformasi dan kritis.

Namun, meskipun media sosial seperti Instagram dapat menyebarkan informasi dengan cepat, platform ini juga rentan terhadap penyebaran disinformasi. Dalam diskusi tentang batas usia capres/cawapres, bisa saja muncul informasi yang tidak akurat atau menyesatkan yang beredar luas, terutama jika disebarkan oleh akun-akun yang tidak kredibel. Disinformasi ini dapat memengaruhi opini publik secara negatif dan menciptakan kebingungan tentang apa yang sebenarnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu efek dari jaringan sosial di Instagram adalah terbentuknya *filter bubble* atau *echo chamber*, di mana pengguna cenderung hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan opini mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat bias politik tertentu, karena pengguna cenderung

hanya berinteraksi dengan konten atau akun yang sejalan dengan pandangan mereka. Dalam isu batas usia capres/cawapres, pengguna mungkin hanya melihat perspektif yang mendukung atau menolak keputusan MK tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain, yang dapat membatasi dialog politik yang sehat.

Pengaruh media sosial dan jaringan sosial di Instagram dalam diskusi tentang batasan usia capres/cawapres sangat kuat. Instagram berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, memobilisasi aksi sosial, dan meningkatkan kesadaran politik, khususnya di kalangan Gen Z. Meskipun ada potensi risiko disinformasi dan terbentuknya *echo chamber*, Instagram tetap menjadi salah satu ruang utama bagi generasi muda untuk terlibat dalam perdebatan politik dan menyuarakan aspirasi mereka.

3.2.3. Pengaruh Nilai dan Aspirasi Politik

Pengaruh nilai dan aspirasi politik di Instagram terhadap isu batasan usia capres dan cawapres sangat signifikan, terutama di kalangan Gen Z yang aktif menggunakan platform ini untuk menyuarakan pendapat dan berdiskusi mengenai politik. Sebagai generasi yang dikenal memiliki nilai-nilai progresif dan keinginan untuk melihat perubahan nyata dalam politik, Instagram menjadi ruang bagi mereka untuk mengungkapkan aspirasi politik mereka terkait isu-isu penting seperti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia capres/cawapres.

Banyak dari Gen Z yang aktif di Instagram merasa bahwa generasi muda harus lebih terwakili dalam posisi kepemimpinan, termasuk dalam pencalonan capres dan cawapres. Mereka melihat batas usia capres/cawapres sebagai salah satu hambatan untuk keterlibatan pemimpin muda dalam politik nasional. Aspirasi ini memotivasi mereka untuk menggunakan Instagram sebagai platform untuk menyuarakan dukungan terhadap penurunan batas usia atau menuntut perubahan agar pemimpin muda yang lebih progresif dan relevan dengan zaman bisa mencalonkan diri.

Gen Z dikenal sebagai generasi yang sangat peduli terhadap perubahan sosial dan politik, serta memiliki nilai-nilai progresif yang mendukung kesetaraan dan keberagaman. Banyak dari mereka yang mendukung keterlibatan lebih besar dari generasi muda dalam politik, dan melihat keputusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres sebagai langkah positif untuk memperbesar kesempatan bagi pemimpin muda yang dapat mewakili aspirasi mereka. Mereka percaya bahwa generasi muda memiliki ide-ide segar yang bisa mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti masalah ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Namun, ada juga Gen Z yang lebih skeptis terhadap perubahan tersebut. Mereka mungkin beranggapan bahwa meskipun pemimpin muda penting, pengalaman tetap menjadi hal yang krusial dalam memimpin negara. Pandangan semacam ini bisa memengaruhi bagaimana mereka menanggapi keputusan MK, tergantung pada keyakinan pribadi mereka tentang kemampuan pemimpin muda. Seperti yang dikatakan oleh Mahasiswa Universitas Tidar, Enggar Adi mengatakan bahwa :

“Faktor yang memotivasi saya untuk berkomentar atau berbagi pendapat mengenai keputusan batasan usia capres/cawapres di Instagram meliputi keinginan untuk terlibat dalam diskusi politik yang relevan dengan masa depan mereka, rasa ingin tahu akan keterwakilan anak muda dalam kepemimpinan, dan pengaruh dari teman sebaya atau influencer. Selain itu, media sosial instagram memberi mereka platform yang mudah dan cepat untuk menyuarakan opini serta melihat tanggapan dari berbagai sudut pandang secara real-time.” (Wawancara dengan Enggar Adi selaku Mahasiswa Untidar, Sabtu, 5 Oktober 2024)

Nilai-nilai keadilan dan kesetaraan juga memainkan peran penting dalam cara Gen Z memandang batasan usia capres/cawapres. Di Instagram, diskusi mengenai putusan MK ini sering kali dikaitkan dengan ide tentang kesempatan yang adil bagi semua orang, termasuk generasi muda. Mereka yang merasa bahwa pembatasan usia adalah bentuk diskriminasi terhadap kemampuan dan potensi pemimpin muda, sering kali menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Diskusi ini dapat memicu dialog lebih luas tentang perlunya penilaian kepemimpinan berdasarkan kemampuan, visi, dan kompetensi, bukan semata-mata pada usia. Nilai-nilai politik yang dipegang oleh para pengguna Instagram juga sering kali dibentuk oleh influencer atau komunitas politik yang mereka ikuti. Ketika seorang influencer atau tokoh politik di Instagram mendukung keterlibatan pemimpin muda

atau menyoroti perlunya perubahan dalam batasan usia capres/cawapres, pengikut mereka yang memiliki nilai-nilai serupa akan lebih mudah terdorong untuk mengadopsi pandangan yang sama. Aspirasi politik komunitas di Instagram juga membantu memperkuat narasi tentang perlunya regenerasi kepemimpinan di Indonesia.

Sebagai generasi yang tumbuh dalam era digital dengan akses mudah ke informasi global, banyak Gen Z di Instagram yang memegang nilai-nilai progresif. Mereka cenderung mendukung ide-ide baru, perubahan kebijakan, dan inovasi dalam kepemimpinan politik. Dalam konteks ini, isu batas usia capres/cawapres dipandang sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana politik Indonesia harus berkembang agar lebih inklusif dan dinamis. Mereka menginginkan pemimpin yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki visi yang segar, adaptif terhadap perubahan zaman, dan memahami kebutuhan generasi muda.

Nilai-nilai dan aspirasi politik juga diperkuat oleh kampanye sosial yang sering kali dilakukan di Instagram, seperti tagar (hashtag) atau gerakan sosial yang mendukung pemimpin muda. Kampanye ini mengajak pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya reformasi politik, termasuk isu-isu yang berhubungan dengan batas usia capres/cawapres. Melalui kampanye tersebut, aspirasi politik Gen Z tentang pemimpin muda yang relevan dengan zaman menjadi lebih terorganisir dan mudah terlihat oleh publik dan pembuat kebijakan. Selain itu, nilai-nilai yang dipegang oleh Gen Z sering kali berbenturan dengan pandangan tradisional yang menekankan pentingnya pengalaman dalam politik. Beberapa pengguna Instagram mungkin mendukung keputusan MK dengan argumen bahwa usia yang lebih tua membawa pengalaman dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk memimpin negara. Sementara itu, yang lain berargumen bahwa pemimpin muda dapat membawa visi yang lebih segar dan relevan untuk mengatasi tantangan masa kini, seperti teknologi, perubahan iklim, dan inovasi ekonomi.

Nilai dan aspirasi politik di Instagram sangat memengaruhi bagaimana pengguna, khususnya Gen Z, merespons keputusan MK tentang batas usia

capres/cawapres. Aspirasi akan keterwakilan generasi muda, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta progresivitas dalam politik mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam diskusi dan kampanye di platform ini. Melalui influencer, komunitas politik, dan kampanye sosial, mereka membentuk narasi bahwa perubahan dalam batas usia capres/cawapres diperlukan untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih inklusif, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

3.2.4. Pengaruh Tokoh Publik dan Influencer

Di media sosial, Gen Z sering mengikuti influencer dan tokoh publik yang memiliki pandangan kuat mengenai isu-isu politik. Pendapat dari figur-figur ini dapat memiliki pengaruh besar terhadap pandangan mereka. Jika influencer atau tokoh publik mendukung atau mengkritik keputusan MK, Gen Z yang mengikuti mereka mungkin akan terpengaruh dan mengadopsi pandangan yang sama. Ini mencerminkan betapa besar pengaruh figur publik di media sosial dalam membentuk opini dan sikap politik generasi muda. Pengaruh tokoh publik dan influencer di Instagram memainkan peran penting dalam membentuk opini publik mengenai batasan usia capres dan cawapres. Sebagai figur yang diikuti oleh jutaan orang, terutama dari kalangan Gen Z dan milenial, tokoh-tokoh ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia tersebut.

Tokoh publik dan influencer sering kali menjadi sumber informasi utama bagi pengikut mereka. Ketika mereka membahas isu batas usia capres/cawapres, baik melalui postingan, story, maupun live session, mereka membantu menyebarkan informasi mengenai keputusan tersebut dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens. Influencer dengan latar belakang politik atau advokasi tertentu dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam, sementara influencer di luar ranah politik mungkin menyederhanakan isu tersebut sehingga lebih banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Seperti yang dikatakan oleh Bachrul Rizal selaku Mahasiswa Universitas Duta Bangsa yaitu :

“Saya percaya bahwa pengaruh influencer di Instagram dapat berkontribusi secara signifikan pada perubahan kebijakan politik di masa depan. Influencer memiliki kemampuan untuk mencapai audiens yang luas,

terutama di kalangan Gen Z dan milenial, yang merupakan kelompok demografis yang semakin aktif dalam politik. Ketika influencer membahas isu-isu politik atau kebijakan, mereka dapat menggerakkan opini publik, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi politik di kalangan pengikutnya. Dukungan influencer terhadap gerakan atau kampanye tertentu dapat memicu perbincangan luas di media sosial, yang pada akhirnya bisa memengaruhi pembuat kebijakan untuk merespons tuntutan publik. Namun, efektivitasnya juga bergantung pada kredibilitas influencer dan kualitas informasi yang mereka bagikan.” (Wawancara dengan Bachrul Rizal selaku Mahasiswa Universitas Duta Bangsa, Senin 7 Oktober 2024)

Karena influencer sering dipandang sebagai sosok yang relatable, pendapat mereka dapat mempengaruhi bagaimana pengikut mereka memandang suatu isu. Jika seorang influencer mendukung keputusan MK tentang batas usia, pengikutnya mungkin akan lebih cenderung menyetujui pandangan tersebut. Sebaliknya, jika influencer mengkritik keputusan ini, pengikut mereka juga mungkin terpengaruh untuk bersikap lebih kritis. Hal ini dapat menciptakan tren opini di media sosial yang memperkuat atau menantang kebijakan politik. Selain mempengaruhi opini, tokoh publik dan influencer juga memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa. Mereka bisa memotivasi pengikutnya untuk terlibat lebih aktif dalam aksi politik, seperti menyuarakan pendapat di media sosial, mengikuti petisi, atau bahkan turun ke jalan dalam bentuk protes atau demonstrasi. Kampanye sosial yang dimulai oleh influencer terkait batas usia capres/cawapres dapat menjadi viral, memicu diskusi lebih luas, dan menekan pembuat kebijakan untuk memperhatikan aspirasi generasi muda. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu yang mereka angkat, tokoh publik dan influencer bisa secara tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Ketika pembicaraan mengenai batas usia capres/cawapres menjadi perbincangan yang ramai di media sosial dan mendapat dukungan luas, para pembuat kebijakan mungkin merasa perlu untuk merespons tuntutan publik tersebut. Selain itu, beberapa tokoh publik yang memiliki pengaruh politik atau sosial yang signifikan dapat langsung terlibat dalam advokasi untuk perubahan kebijakan. Namun, ada risiko bahwa pengaruh tokoh publik dan influencer bisa berdampak negatif jika informasi yang mereka bagikan tidak akurat atau hanya berdasarkan opini pribadi yang tidak didukung fakta. Pengikut yang mempercayai influencer tanpa memverifikasi informasi dapat terdorong untuk membentuk pendapat yang salah tentang batas usia

capres/cawapres, yang berpotensi menciptakan polarisasi atau kesalahpahaman di masyarakat.

Pengaruh tokoh publik dan influencer di Instagram sangat kuat dalam membentuk opini dan menggerakkan diskusi terkait batas usia capres/cawapres. Mereka berperan dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan bahkan memobilisasi aksi politik. Namun, penting juga bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap informasi yang mereka terima dari influencer, memastikan bahwa diskusi yang terjadi didasarkan pada fakta yang akurat dan bukan sekadar opini yang tidak mendalam.

BAB IV

REFLEKSI TEMUAN

Penelitian yang berjudul "Respon Gen Z di Media Sosial Instagram terhadap Keputusan MK tentang Batasan Usia Capres/Cawapres 2024" ini memberikan banyak pelajaran penting tentang bagaimana media sosial, khususnya Instagram, berfungsi sebagai wadah ekspresi politik bagi generasi muda, khususnya Gen Z. Selama proses penelitian, penulis melihat bahwa generasi Z ternyata tidak hanya aktif di media sosial untuk hal-hal hiburan saja, tetapi juga sangat vokal terhadap isu-isu politik yang menyangkut masa depan mereka. Penelitian ini mengajarkan penulis bahwa keterlibatan politik di media sosial bukan sekadar “trend” belaka, tetapi bisa menjadi indikator kesadaran dan kepedulian politik di kalangan generasi muda. Banyak dari mereka yang merasa bahwa batas usia dalam kepemimpinan adalah isu penting karena memengaruhi siapa yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Penulis menemukan bahwa Instagram menjadi platform untuk menyuarakan pendapat secara terbuka, di mana banyak Gen Z berdiskusi dan saling memengaruhi tentang pentingnya dinamika politik serta peremajaan kepemimpinan.

Refleksi ini mengajarkan penulis betapa besarnya potensi media sosial sebagai alat untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, penelitian ini menginspirasi saya untuk terus mempelajari bagaimana media sosial bisa menjadi sarana untuk mendorong perubahan sosial yang positif. Dengan menyadari peran dan kekuatan suara generasi muda, saya berharap penelitian ini bisa menjadi referensi untuk mendorong keterlibatan yang lebih kritis, terutama bagi teman-teman seusia saya yang mungkin masih belum sadar akan kekuatan partisipasi di ruang digital. Penulis melihat bahwa generasi Z memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini publik dan, dalam jangka panjang, kebijakan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru tentang pentingnya suara generasi muda dalam isu-isu politik dan hukum yang berdampak pada mereka. Penulis merasa bahwa penelitian ini tidak hanya menambah wawasan akademik, tetapi juga memperkuat keyakinan saya akan pentingnya peran aktif generasi muda dalam menentukan arah bangsa.

Refleksi akademik terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya memahami kompleksitas dan karakteristik Generasi Z dalam konteks digital dan sosial yang mereka hadapi, terutama di media sosial. Beberapa penelitian terdahulu memberikan wawasan penting yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian ini, khususnya dalam mengeksplorasi bagaimana Generasi Z di Indonesia merespons isu-isu penting seperti kebebasan berpendapat, literasi digital, dan partisipasi politik melalui platform media sosial.

4.1. Andrias Pujiono pada tahun 2021 yang berjudul “Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z”

Penelitian Andrias Pujiono (2021) menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi media pembelajaran yang relevan bagi Gen Z. Hal ini relevan dengan penelitian saya, karena platform seperti Instagram sering digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan pandangan dan memperoleh pengetahuan seputar isu-isu sosial dan politik. Dengan demikian, pendekatan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana belajar dan berbagi informasi sangat penting dalam memahami pola komunikasi dan keterlibatan politik Generasi Z. Penelitian Andrias Pujiono (2021) mengungkapkan bahwa media sosial memainkan peran signifikan sebagai media pembelajaran bagi Generasi Z. Media sosial, termasuk Instagram, menyediakan ruang bagi Generasi Z untuk memperoleh informasi, berdiskusi, dan membangun pandangan mereka terhadap isu-isu tertentu. Beberapa poin utama dari temuan ini dapat direfleksikan dalam konteks penelitian tentang respon Gen Z terhadap putusan MK terkait batas usia capres/cawapres 2024 :

a. Media Sosial sebagai Sumber Informasi

Andrias menyoroti bahwa Generasi Z cenderung menggunakan media sosial sebagai salah satu sumber utama informasi. Dalam konteks putusan MK, Instagram menjadi platform untuk menyebarkan informasi terkait keputusan hukum tersebut, baik melalui berita resmi, diskusi di kolom komentar, maupun unggahan kreatif (meme, infografis). Penelitian ini perlu mengkaji bagaimana tingkat literasi digital Gen Z memengaruhi

pemahaman mereka terhadap isu hukum dan politik yang kompleks seperti ini.

b. Interaksi dan Diskusi Digital

Generasi Z, menurut temuan Andrias, aktif dalam berdiskusi dan membagikan opini mereka di media sosial. Instagram sebagai platform berbasis visual dapat memfasilitasi diskusi melalui fitur komentar, unggahan ulang (repost), dan cerita (stories). Penelitian ini bisa mengobservasi bagaimana diskusi tersebut mencerminkan pemahaman Gen Z tentang pentingnya keterlibatan anak muda dalam politik dan kepemimpinan.

c. Pembentukan Sikap dan Persepsi

Media sosial tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga arena pembentukan sikap. Penelitian ini dapat memanfaatkan teori yang digunakan Andrias untuk mengeksplorasi bagaimana konten yang dikonsumsi di Instagram memengaruhi persepsi Gen Z tentang keadilan, relevansi batas usia, dan representasi politik.

d. Keterlibatan Generasi Z dalam Isu Publik

Andrias menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kemampuan untuk terlibat secara kritis dalam isu-isu yang relevan. Dalam konteks putusan MK, penelitian ini dapat menggali sejauh mana Generasi Z menggunakan Instagram untuk mengekspresikan dukungan, kritik, atau bahkan netralitas terhadap keputusan tersebut.

e. Kesadaran akan Validitas Informasi

Temuan Andrias tentang pentingnya literasi digital relevan dengan penelitian ini, terutama mengingat maraknya disinformasi di media sosial. Penelitian ini dapat menilai sejauh mana Gen Z mampu menyaring informasi yang valid dari berbagai perspektif yang muncul di Instagram terkait putusan MK.

Kesimpulannya, refleksi terhadap temuan Andrias Pujiono memberikan dasar yang kuat untuk memahami perilaku, persepsi, dan partisipasi Gen Z di media sosial. Dengan memanfaatkan wawasan ini, penelitian tentang respon Gen Z

terhadap putusan MK dapat lebih terarah dalam mengeksplorasi dinamika media sosial sebagai medium pembelajaran, partisipasi politik, dan pembentukan opini.

4.2. Fauziah Nur Hasibuan dkk pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Penggunaan Bahasa Gaul pada Public Figure Jerome Polin”

Penelitian Fauziah Nur Hasibuan dkk. (2024) tentang penggunaan bahasa gaul oleh public figure seperti Jerome Polin juga memberikan perspektif menarik tentang dinamika bahasa di era digital. Bahasa gaul tidak hanya menarik perhatian Gen Z, tetapi juga membentuk identitas kolektif mereka. Dalam konteks penelitian saya, hal ini dapat berperan dalam melihat bagaimana bahasa dan gaya komunikasi Gen Z mempengaruhi cara mereka menyuarakan opini politik dan bereaksi terhadap isu-isu penting, termasuk kebijakan pemerintah. Penelitian ini memengaruhi komunikasi, keterlibatan, dan penerimaan pesan di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z. Temuan ini relevan untuk memahami respon Gen Z terhadap putusan MK tentang batas usia capres/cawapres 2024 karena aspek bahasa dan gaya komunikasi yang digunakan di media sosial berperan besar dalam membangun koneksi dengan audiens muda. Penulis mendapati bahwa penggunaan bahasa gaul memainkan peran penting dalam komunikasi di media sosial. Sama seperti Jerome Polin yang dikenal menggunakan bahasa santai dan relatable, Gen Z di Instagram sering kali menyampaikan pendapat mereka dengan gaya bahasa yang serupa. Mulai dari meme yang jenaka, komentar lucu, hingga narasi kreatif, semua ini menunjukkan bahwa bahasa informal adalah alat yang efektif untuk menyederhanakan topik serius seperti hukum dan politik. Pendekatan ini membuat diskusi terasa lebih ringan, namun tetap substansial, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Peran public figure juga tidak bisa diabaikan. Temuan Fauziah Nur Hasibuan dkk. menunjukkan bahwa figur publik seperti Jerome Polin dapat memengaruhi persepsi audiens melalui gaya komunikasi mereka. Dalam konteks putusan MK, public figure muda yang aktif di Instagram sering kali menjadi pusat perhatian, baik melalui unggahan langsung maupun kolaborasi dengan konten kreator lain. Cara mereka menyuarakan opini, dengan gaya yang khas dan dekat dengan Gen Z, mampu menjadi katalisator diskusi yang lebih luas di platform

tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana kehadiran tokoh-tokoh inspiratif dapat meningkatkan minat dan keterlibatan Gen Z dalam isu-isu publik.

Selain itu, pentingnya adaptasi pesan pada platform media sosial juga terlihat jelas. Instagram, sebagai platform berbasis visual, membutuhkan pendekatan yang kreatif agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Sama seperti Jerome Polin yang menyesuaikan gaya komunikasinya sesuai audiens, para pengguna Instagram yang membahas putusan MK sering kali mengemas informasi dalam bentuk infografis, video pendek, atau caption menarik yang menggunakan bahasa gaul. Pendekatan ini tidak hanya membuat konten lebih menarik, tetapi juga membantu meningkatkan pemahaman Gen Z terhadap isu-isu politik yang mungkin sebelumnya terasa kompleks. Keterlibatan audiens melalui interaksi digital juga menjadi poin penting. Gaya komunikasi santai dan relatable mendorong Gen Z untuk aktif berkomentar, berdiskusi, dan berbagi pandangan mereka di Instagram. Dalam diskusi tentang batas usia capres/cawapres, komentar seperti "bener banget nih!" atau "kayaknya kita perlu pemimpin muda deh" sering muncul, mencerminkan bagaimana gaya bahasa memfasilitasi dialog yang lebih organik. Hal ini juga menguatkan solidaritas di antara sesama pengguna, karena mereka merasa memiliki ruang yang aman untuk berbagi pandangan.

Terakhir, bahasa gaul mencerminkan identitas budaya Gen Z. Melalui penggunaan bahasa ini, mereka tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dalam menyuarakan aspirasi politik. Dalam konteks penelitian saya, bahasa gaul yang digunakan di Instagram bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk menunjukkan bahwa Gen Z peduli dengan isu-isu politik, sekaligus membentuk cara mereka merespon isu-isu tersebut dengan cara yang unik dan khas generasi mereka.

Temuan dari penelitian Fauziah Nur Hasibuan dkk. menunjukkan bahwa bahasa dan gaya komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik audiens, seperti penggunaan bahasa gaul, berperan penting dalam menarik perhatian dan memengaruhi persepsi Gen Z. Dalam konteks respon Gen Z terhadap putusan MK, refleksi ini memberikan dasar untuk menganalisis bagaimana gaya komunikasi di

Instagram memediasi pemahaman dan keterlibatan mereka dalam isu politik yang kompleks.

4.3. Anisa Rizki Sabrina pada tahun 2018 yang berjudul “Literasi Digital sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax”

Studi literasi digital oleh Anisa Rizki Sabrina (2018) tentang upaya preventif dalam menanggulangi hoax menyoroti pentingnya kemampuan literasi digital untuk menyeleksi informasi yang valid dan menghindari penyebaran misinformasi. Literasi digital yang kuat memungkinkan Gen Z menjadi pemilih informasi yang bijak, yang sangat penting dalam konteks media sosial di mana berbagai opini dan informasi politik dapat tersebar tanpa verifikasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital menjadi fondasi penting bagi Generasi Z dalam merespons isu-isu seperti batas usia capres-cawapres, sehingga mereka bisa mendiskusikannya secara lebih cerdas dan terinformasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi penelitian mengenai respon Gen Z di media sosial Instagram terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres/cawapres 2024. Temuan Anisa menekankan pentingnya literasi digital sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengidentifikasi dan menyaring informasi yang valid. Hal ini sangat relevan mengingat media sosial seperti Instagram sering menjadi ruang diskusi politik, tetapi juga rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar.

Salah satu poin penting dari temuan Anisa adalah bahwa literasi digital membantu individu untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Dalam konteks penelitian ini, putusan MK tentang batas usia capres/cawapres sering kali dibahas dengan narasi yang bias atau bahkan disinformasi di media sosial. Gen Z yang memiliki tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih mampu membedakan antara fakta dan opini serta memverifikasi kebenaran informasi sebelum berpartisipasi dalam diskusi atau menyebarkannya lebih lanjut. Penelitian ini dapat menggali sejauh mana literasi digital Gen Z memengaruhi respon mereka terhadap isu ini di Instagram. Selain itu, Anisa juga menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran etis dalam menggunakan media sosial. Hal ini relevan dengan bagaimana

Gen Z menggunakan Instagram untuk menanggapi isu-isu seperti putusan MK. Mereka yang memiliki kesadaran etis akan lebih cenderung menyuarakan pendapat dengan cara yang konstruktif, menghindari ujaran kebencian, dan mendukung diskusi yang sehat. Penelitian ini bisa mengamati apakah literasi digital membantu membentuk perilaku ini di kalangan Gen Z. Penelitian Anisa juga menyoroti pentingnya peran edukasi dalam meningkatkan literasi digital. Dalam konteks penelitian ini, peran figur publik, influencer, atau akun edukatif di Instagram sangat signifikan. Mereka dapat berfungsi sebagai fasilitator literasi digital dengan membagikan informasi yang valid, menyediakan konteks hukum, atau mengajak audiens untuk berpikir kritis. Penelitian ini dapat mengeksplorasi sejauh mana konten edukatif semacam itu memengaruhi cara Gen Z memahami dan merespons isu batas usia capres/cawapres.

Terakhir, literasi digital juga terkait erat dengan kemampuan Gen Z untuk mengelola informasi secara selektif. Dalam era banjir informasi, seperti yang dicatat Anisa, individu harus memiliki keterampilan untuk memilah informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Penelitian ini dapat menganalisis apakah Gen Z menggunakan keterampilan ini saat berinteraksi dengan konten di Instagram terkait putusan MK, misalnya dengan memeriksa sumber berita atau membandingkan berbagai sudut pandang sebelum menyuarakan pendapat mereka.

Dengan mengintegrasikan refleksi dari temuan Anisa Rizki Sabrina, penelitian tentang respon Gen Z di Instagram terhadap putusan MK dapat menyoroti peran literasi digital sebagai fondasi untuk membangun diskusi yang sehat, partisipasi politik yang kritis, dan penyebaran informasi yang bertanggung jawab di media sosial.

4.4. Merle Emanuella Aipassa pada tahun 2024 yang berjudul “Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”

Penelitian Merle Emanuella Aipassa (2024) mengenai AI sebagai tantangan kebebasan berpendapat di media sosial menambah dimensi kritis dalam memahami bagaimana AI dan algoritma dapat mempengaruhi opini publik Gen Z. Dengan algoritma yang mengatur konten di media sosial, terdapat risiko bias informasi yang

dapat menghalangi kebebasan berpendapat dan mempengaruhi cara Gen Z menerima isu politik. Ini penting untuk penelitian saya dalam memahami konteks yang memengaruhi kebebasan Gen Z untuk menyuarakan pendapat mereka secara independen dan adil di media sosial. Penelitian ini memberikan perspektif berharga untuk memahami dinamika respon Gen Z di Instagram terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres/cawapres 2024. Penelitian ini menyoroti bagaimana teknologi kecerdasan buatan (AI) berperan dalam mengelola dan, dalam beberapa kasus, membatasi kebebasan berpendapat di media sosial. Hal ini sangat relevan dalam konteks Instagram, yang menjadi platform utama bagi Gen Z untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang isu-isu politik.

Salah satu temuan penting dari penelitian Merle adalah bagaimana algoritma AI di media sosial dapat memengaruhi visibilitas konten. Di Instagram, konten yang dianggap "relevan" oleh algoritma sering kali diprioritaskan untuk dilihat oleh pengguna. Dalam konteks isu putusan MK, algoritma ini dapat membatasi atau mempromosikan diskusi tertentu, tergantung pada bagaimana konten tersebut sesuai dengan kebijakan platform. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana algoritma Instagram memengaruhi penyebaran opini Gen Z terkait isu ini, serta apakah mereka merasa kebebasan berekspresi mereka dibatasi oleh platform.

Merle juga menunjukkan bahwa AI sering digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten yang dianggap melanggar kebijakan komunitas, seperti ujaran kebencian atau disinformasi. Meskipun ini bertujuan baik, mekanisme ini juga memiliki risiko bias dan over-policing, di mana konten yang sah namun sensitif dapat dihapus. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Gen Z menghadapi tantangan ini ketika mencoba menyuarakan pendapat mereka tentang batas usia capres/cawapres. Apakah mereka merasa lebih berhati-hati atau bahkan terintimidasi untuk berbicara di media sosial karena risiko dihapusnya konten. Selain itu, Merle menyoroti bahwa AI dapat menciptakan filter bubble atau ruang gema (*echo chamber*), di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri. Dalam kasus putusan MK, filter bubble ini dapat mempersempit ruang diskusi kritis di antara Gen Z. Penelitian

ini dapat mengeksplorasi apakah Gen Z menyadari dampak filter bubble terhadap pemahaman mereka tentang isu politik, dan bagaimana mereka mencoba keluar dari batasan algoritma untuk mencari perspektif yang lebih beragam.

Yang terakhir, penelitian Merle menggarisbawahi pentingnya edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak AI terhadap kebebasan berpendapat. Dalam penelitian tentang respon Gen Z, ini menjadi relevan untuk melihat apakah mereka memiliki pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja di Instagram dan bagaimana mereka memanfaatkan platform tersebut untuk tetap menyuarakan pendapat secara efektif meski menghadapi tantangan teknologi.

Refleksi dari temuan Merle Emanuella Aipassa ini memberikan sudut pandang kritis tentang hubungan antara teknologi dan kebebasan berekspresi. Dengan mengintegrasikan temuan ini, penelitian tentang respon Gen Z di Instagram terhadap putusan MK dapat menyoroti bagaimana teknologi AI membentuk cara generasi muda berbicara, berdebat, dan berpartisipasi dalam diskusi politik di era digital.

4.5. Moh. Arief Rakhman dan Hariyadi pada tahun 2019 yang berjudul “Perilaku Dan Partisipasi Politik Generasi Z”

Akhirnya, penelitian Moh. Arief Rakhman dan Hariyadi (2019) tentang partisipasi politik Generasi Z menegaskan bahwa generasi ini memiliki karakteristik partisipatif dan inovatif dalam politik. Dengan preferensi terhadap media partisipatif yang sesuai dengan gaya komunikasi mereka, Generasi Z membutuhkan pendekatan yang inklusif agar aspirasi politik mereka dapat tersalurkan dengan baik. Wawasan ini penting untuk memahami bahwa pola partisipasi politik Gen Z di media sosial perlu difasilitasi dengan cara yang lebih inklusif dan adaptif. Penelitian ini memberikan dasar penting untuk memahami bagaimana Gen Z mengekspresikan keterlibatan mereka dalam isu-isu politik, termasuk respon mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres/cawapres 2024 di Instagram. Temuan mereka menyoroti karakteristik unik dari partisipasi politik Gen Z yang cenderung berbasis digital, informal, dan

terfokus pada isu-isu yang mereka anggap relevan dengan identitas dan nilai-nilai mereka.

Salah satu temuan penting adalah bahwa Gen Z lebih memilih bentuk partisipasi politik yang non-konvensional, seperti menyuarakan opini di media sosial, berbagi informasi melalui unggahan, atau mendukung gerakan melalui tagar. Dalam konteks putusan MK, perilaku ini tercermin dari bagaimana mereka menggunakan Instagram untuk berbagi pandangan, baik melalui komentar, cerita, atau meme. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana sifat partisipasi yang informal ini memengaruhi diskusi politik di kalangan Gen Z, dan sejauh mana platform seperti Instagram memfasilitasi atau membatasi keterlibatan mereka. Rakhman dan Hariyadi juga mencatat bahwa Gen Z sering mengaitkan partisipasi politik mereka dengan identitas pribadi dan kelompok. Dalam isu batas usia capres/cawapres, Gen Z mungkin melihat ini sebagai cerminan dari perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan politik dan peluang kepemimpinan bagi generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa respon mereka di Instagram bukan hanya ekspresi opini, tetapi juga bentuk solidaritas untuk mendukung nilai-nilai tertentu, seperti inklusivitas dan kesetaraan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya media sosial sebagai ruang bagi Gen Z untuk belajar tentang politik. Namun, ada tantangan berupa potensi disinformasi dan polarisasi yang juga tercatat dalam temuan mereka. Dalam penelitian ini, dapat dieksplorasi apakah Instagram menjadi ruang edukasi politik yang efektif bagi Gen Z dalam memahami isu batas usia capres/cawapres, atau justru menjadi tempat yang memperkuat bias informasi dan emosi dalam diskusi politik.

Yang terakhir, temuan Rakhman dan Hariyadi juga menunjukkan bahwa partisipasi politik Gen Z sering kali dipengaruhi oleh rasa percaya mereka terhadap sistem politik. Dalam konteks putusan MK, penelitian ini dapat menganalisis apakah respon mereka di Instagram menunjukkan tingkat kepercayaan atau skeptisisme terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Sikap ini dapat terlihat dari nada komentar, jenis konten yang mereka bagikan, atau pola interaksi mereka dengan pengguna lain.

Refleksi dari penelitian Moh. Arief Rakhman dan Hariyadi memberikan kerangka kerja untuk memahami dimensi perilaku dan partisipasi politik Gen Z di Instagram. Dengan mengintegrasikan temuan ini, penelitian tentang respon Gen Z terhadap putusan MK dapat mengeksplorasi bagaimana karakteristik digital, identitas kolektif, dan persepsi terhadap sistem politik memengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam diskusi publik di era media sosial.

Penulis menyadari bahwa penelitiannya memiliki posisi penting dalam menggali lebih jauh karakteristik dan dinamika Generasi Z dalam berpendapat dan berpartisipasi di media sosial. Dengan memanfaatkan temuan-temuan sebelumnya, saya berharap dapat lebih memahami bagaimana Generasi Z dapat memainkan peran aktif dalam politik digital secara lebih adil dan efektif. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pemahaman akademik, tetapi juga berpotensi memberikan masukan berharga bagi pemangku kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif bagi Generasi Z, generasi yang memiliki peran penting dalam masa depan politik dan sosial Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami respon Gen Z di media sosial Instagram terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia capres/cawapres dalam Pemilu 2024. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis terhadap konten serta interaksi yang terjadi di platform Instagram, penelitian ini menemukan bahwa Gen Z memiliki pandangan yang beragam terkait putusan MK tersebut. Sebagian besar dari mereka mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap batasan usia yang dinilai menghambat partisipasi generasi muda dalam dunia politik. Namun, ada juga yang mendukung keputusan tersebut, dengan alasan bahwa usia yang lebih matang diperlukan untuk memimpin negara.

Percakapan Gen Z di media sosial Instagram terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia capres/cawapres 2024 menunjukkan bahwa Gen Z aktif terlibat dalam diskusi politik melalui platform ini. Sebagai generasi yang sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial, Gen Z memanfaatkan Instagram untuk mengungkapkan pendapat mereka mengenai putusan MK tersebut, yang menetapkan batasan usia minimal capres/cawapres menjadi 40 tahun. Di Instagram, percakapan yang muncul sangat beragam, dengan sebagian besar menunjukkan ketidaksetujuan terhadap batasan usia tersebut, karena dianggap menghambat peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik.

Faktor-faktor yang memengaruhi pendapat Gen Z dalam merespon putusan ini di media sosial mencakup akses terhadap informasi yang cepat dan luas, pengaruh opini dari influencer dan tokoh publik yang mereka ikuti, serta nilai-nilai politik yang dianut oleh generasi muda ini. Di Instagram, Gen Z tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen opini yang aktif berpartisipasi dalam diskusi politik. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat dan memengaruhi pandangan

orang lain melalui konten kreatif, seperti meme, infografis, atau video. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial di media sosial berperan penting dalam membentuk sikap politik Gen Z. Komunitas online yang terbentuk di Instagram menjadi ruang bagi mereka untuk bertukar pandangan, memperdebatkan isu-isu politik, dan memperkuat identitas politik mereka. Melalui interaksi ini, pendapat Gen Z semakin terpolarisasi dan menciptakan wacana yang lebih dinamis dalam masyarakat.

Sikap digital Gen Z di media sosial Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia capres/cawapres. Gen Z, yang dikenal sebagai generasi yang sangat terhubung dengan dunia digital, menggunakan Instagram sebagai platform utama untuk menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan terlibat dalam diskusi politik. Sikap digital Gen Z, yang mencakup kemampuan untuk mengakses, menyaring, dan menyebarkan informasi dengan cepat, mempengaruhi cara mereka memandang putusan MK mengenai batasan usia capres/cawapres. Sikap digital Gen Z juga tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan konten politik, baik itu melalui komentar, unggahan, atau partisipasi dalam diskusi. Mereka cenderung lebih kritis terhadap keputusan-keputusan yang dianggap tidak mencerminkan peluang yang lebih besar bagi generasi muda dalam terlibat dalam politik, seperti halnya pembatasan usia capres/cawapres. Di Instagram, Gen Z menggunakan platform ini untuk menyebarkan opini melalui berbagai bentuk konten kreatif, seperti meme, infografis, dan video, yang memudahkan mereka untuk mengkomunikasikan pandangan mereka kepada audiens yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Gen Z menggunakan media sosial, khususnya Instagram, untuk menanggapi isu-isu politik yang mempengaruhi mereka, serta bagaimana mereka membentuk opini dan berpartisipasi dalam proses politik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini politik di kalangan generasi muda dan dapat menjadi acuan bagi kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi politik mereka di masa depan.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini mengenai respon Gen Z di media sosial Instagram terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia capres/cawapres 2024, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut maupun bagi pembuat kebijakan:

1. Pentingnya Pendidikan Politik bagi Gen Z

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa pendidikan politik memainkan peran penting dalam membentuk pandangan Gen Z terhadap keputusan MK. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga pendidikan dan pemerintah memberikan lebih banyak ruang untuk pendidikan politik yang terstruktur, baik di sekolah maupun di kampus.

2. Pemanfaatan Media Sosial untuk Kampanye Politik yang Positif

Media sosial, khususnya Instagram, telah terbukti menjadi alat efektif untuk berkomunikasi dengan Gen Z. Oleh karena itu, para politisi dan organisasi politik sebaiknya memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan informatif terkait politik dan kebijakan yang ada.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan Influencer

Influencer memiliki pengaruh yang besar terhadap opini politik Gen Z. Para politisi dan lembaga pemerintah dapat bekerja sama dengan influencer yang memiliki kredibilitas untuk menyebarkan pesan-pesan yang membangun dan edukatif terkait isu-isu politik.

4. Meningkatkan Keterlibatan Gen Z dalam Proses Politik

Berdasarkan temuan bahwa banyak Gen Z yang merasa tidak terwakili dalam sistem politik saat ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif memberikan lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses politik.

5. Pemantauan Media Sosial oleh Pihak Berwenang

Dalam konteks diskusi politik yang sering terjadi di media sosial, terutama di Instagram, sangat penting untuk memantau dan mengatur peredaran informasi yang tidak akurat atau hoaks.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Gen Z di media sosial, khususnya Instagram, merespons keputusan MK mengenai batasan usia capres/cawapres. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif Gen Z sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa suara generasi muda didengar dalam proses pengambilan keputusan politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febrianty, & Muhammad. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Pro Gen Z*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Heryanto, G. G. (2022). *Strategi Literasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Iriantara, & Yosol. (2009). *Literasi Media Apa, Mengapa, Bagaimana*. Bandung: Refika Offset.
- Ismail, Widiarti, Muhadiansyah, & Koesumah. (2023). *Modus Suap di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: TEMPO Publishing.
- Kurnia, T. S. (2022). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Sang Penjaga HAM*. Bandung: PT. ALumni.
- Lapa. (2023). *Z Dalam Literasi Digital Fenomena Interaksi Sosial*. Jakarta.
- Litnus. (2023). *Undang Undang Mahkamah Konstitusi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mashuri, Permadi, Vitadiar, & Mujiyanto. (2022). *Buku Ajar Literasi Digital*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Moleong, & Lexy. (Metodologi Penelitian Kualitatif). 2001. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rizal, Rosyidah, Yusnanto, Akbar, & Hidayat. (2022). *Literasi Digital*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Senduk. (2018). *Ignite Millenial Leadership*. Medan: Gramedia Pustaka Utama.
- Setyawan, Karaman, & Widaningrum. (2020). *Dasar Literasi Digital*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press.
- Suhendi, Defri, dkk. (2021). *Peran Literasi Digital di Masa Pandemi*. Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna.

JURNAL :

- Afandi, A., Samudra, J. P., Sherley, S., Veren, V., & Liang, W. (2021). Pengaruh Endorsement Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian pada Generasi Z. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*.
- Aipassa, M. E. (2024). Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*.

- Andriani, E., Prasetya, A. D., & Pratama, B. Y. (2024). Pengaruh Aplikasi TikTok dalam Komunikasi Generasi Z: Tinjauan terhadap Perubahan Pola Interaksi dan Ekspresi Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Azis, H., Pawito, P., & Setyawan, A. (2020). Motif Penggunaan Media Informasi Politik oleh Anak Muda Tionghoa di Media Sosial. *ETTISAL: Journal of Communication*.
- Badrun, U. (2018). Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik Di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 dan Antisipasinya). *Jurnal Lemhannas RI*.
- Dakun, D. (2022). Pengaruh Kemampuan Literasi Digital Dan Tingkat Religiusitas Siswa Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Di Smk Bintang Nusantara School. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan (Jurinotep)*.
- Fauzanafi, M. Z. (2016). Searching for digital citizenship: Fighting corruption in Banten, Indonesia. *ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies*.
- Febriantari, D. S., Mulyono, L. E. H., & Dakwah, M. M. (2023). Pengaruh Influencer Marketing, Application Quality dan Online Customer Review Terhadap Kecepatan Keputusan Pembelian Konsumen Gen-Z Melalui Shopee. *Jurnal Riset Pemasaran*.
- Husna, A. H., & Mairita, D. (2024). Gen Z dan Perilaku Konsumsi Konten Influencer pada TikTok. *Jurnal Riset Komunikasi*, 7(1).
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.
- Nasution, A. K. P. (2020). Integrasi media sosial dalam pembelajaran generasi z. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*.
- Pujiono, A. (2021). Media sosial sebagai media pembelajaran bagi generasi Z. *Didache: Journal of Christian Education*.

- Putri, A. D. (2021). Maksimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pendapatan dan Pengembangan Diri Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service*.
- Putricia, N. D., Febriyanti, A. I., Puteri, N. D., Syukriya, A. R., & Puspita, A. M. I. (2024). Studi Literatur: Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Gen Z (Zoomers). *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*.
- Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2019). Perilaku Dan Partisipasi Politik Generasi Z. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP) Universitas Jambi*.
- Sabrina, A. R. (2018). Literasi digital sebagai upaya preventif menanggulangi hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies*.
- Sari, N. E., & Berlianantiya, M. (2022). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Perilaku Belanja Online Pada Gen-Z Di Universitas Pgri Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.
- Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.

ARTIKEL :

- Ardhi, S. (2023, April 23). Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres. *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*.
- Diponegoro, U. (2023, Mei 3). Literasi Digital dan Urgensinya pada Dunia Pendidikan. *Literasi Digital dan Urgensinya pada Dunia Pendidikan*.
- Lampung, P. P. (2023, November 21). Mengapa Pentingnya Literasi Digital dalam Era Digital? *Mengapa Pentingnya Literasi Digital dalam Era Digital?*

Munawaroh, N. (2023, Oktober 23). Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK. *Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK*.

Wijayanto, W. (2023, April 27). The Rise of Digital Citizenship amidst Indonesia's Democratic Regression. *The Rise of Digital Citizenship amidst Indonesia's Democratic Regression*, pp. -.

UNDANG – UNDANG :

Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan No. 55/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan No. 7/PUU-XV/2017: Fokus pada batas usia kepala daerah (30 tahun) dan mempertahankan aturan yang ada.

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023: Fokus pada batas usia capres/cawapres, mengubah batas usia minimal dari 40 menjadi 35 tahun dengan syarat pengalaman dalam pemerintahan.

WEBSITE :

Ahdiat, A. (2024, September 24). *Media Sosial Favorit Gen Z dan Milenial Indonesia*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/09/24/media-sosial-favorit-gen-z-dan-milenial-indonesia>

Fatmawati, N. (2021, November 2). *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat*. Retrieved from djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/pengaruh-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-masyarakat.html>

Kayla, K. (2023, oktober 29). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*. Retrieved from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/keyshakayla9494/653dc163edff760e-ea25bf52/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-remaja>

- Nanda, E. C. (2024, September 19). *Bukan Google, Gen Z Pilih Media Sosial Sebagai Alat Pencari Informasi Brand*. Retrieved from goodstats.id: <https://goodstats.id/article/google-tak-lagi-relevan-51-gen-z-lebih-memilih-media-sosial-sebagai-alat-pencari-informasi-brand-jYFtd>
- Putri, T. N. (2024, Januari 10). *Pengaruh Influencer dalam Bisnis Online*. Retrieved from [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/tasyanrhlzptr/659e5b98c57afb2682527587/pengaruh-influencer-dalam-bisnis-online) : <https://www.kompasiana.com/tasyanrhlzptr/659e5b98c57afb2682527587/pengaruh-influencer-dalam-bisnis-online>

Lampiran

Lampiran 1. Wawancara Dengan Generasi Z Mahasiswa Universitas Tidar Magelang

Nama : Enggar Adi Kusuma
NIM : 2110201008
Jurusan : S1 Ilmu Administrasi Negara
Universitas : Universitas Tidar
Usia : 21 Tahun
Hari : Sabtu 5 Oktober 2024

Nama		Transkrip
Zafira Zahra	:	Sejauh mana Anda mengetahui tentang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres/cawapres?
Enggar Adi	:	Yang saya ketahui adalah Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan baru sebelum pemilu 2024 yang memutuskan bahwa batasan usia capres/cawapres, di mana syarat minimal usia untuk calon presiden dan wakil presiden diubah menjadi lebih fleksibel dan keputusan ini memungkinkan individu di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Zafira Zahra	:	Apakah Anda merasa keputusan ini relevan atau berpengaruh bagi masa depan politik Indonesia, terutama bagi generasi muda seperti Anda?
Enggar Adi	:	Menurut pendapat saya, saya pribadi tidak setuju bahwa keputusan ini relevan atau berpengaruh bagi masa depan politik Indonesia, terutama bagi generasi muda. Tanpa dukungan sistemik seperti partai politik yang bersedia memberi ruang dan peluang, keputusan ini tidak akan membawa perubahan signifikan dalam representasi politik generasi muda. Akhirnya, perubahan kebijakan yang mendasar diperlukan untuk mengatasi isu-isu

		yang lebih kompleks yang dihadapi oleh generasi muda.
Zafira Zahra	:	Sejauh mana Anda memanfaatkan fitur-fitur di Instagram, seperti IGTV, reels, atau stories, untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang isu politik terkait keputusan MK?
Enggar Adi	:	Saya memanfaatkan fitur-fitur di Instagram seperti IGTV, reels, stories dan kolom komentar untuk memahami isu politik terkait keputusan MK. IGTV memberikan video penjelasan yang lebih mendalam, sementara reels dan stories menyajikan informasi singkat dan visual yang memudahkan pemahaman, Selain itu, kolom komentar sering saya gunakan untuk diskusi cepat, yang membantu saya terlibat dalam percakapan dan mengetahui opini orang lain. Fitur-fitur ini membuat akses informasi lebih mudah dan interaktif.
Zafira Zahra	:	Apa faktor yang memotivasi Anda untuk berkomentar atau berbagi pendapat mereka mengenai keputusan batasan usia ini di Instagram?
Enggar Adi	:	Faktor yang memotivasi saya untuk berkomentar atau berbagi pendapat mengenai keputusan batasan usia capres/cawapres di Instagram meliputi keinginan untuk terlibat dalam diskusi politik yang relevan dengan masa depan mereka, rasa ingin tahu akan keterwakilan anak muda dalam kepemimpinan, dan pengaruh dari teman sebaya atau influencer. Selain itu, media sosial instagram memberi mereka platform yang mudah dan cepat untuk menyuarakan opini serta melihat tanggapan dari berbagai sudut pandang secara real-time.
Zafira Zahra		Sejauh mana Anda usiapercaya bahwa pendidikan yang baik dapat memengaruhi kemampuan Gen Z untuk menyuarakan pendapat mereka di media sosial
Enggar Adi		Saya percaya bahwa pendidikan yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Gen Z dalam menyuarakan pendapat mereka di media sosial. Pendidikan yang

	berkualitas membekali mereka dengan keterampilan literasi digital yang penting untuk menilai dan menyaring informasi, serta kemampuan untuk menyampaikan argumen secara kritis dan konstruktif. Selain itu, pendidikan yang baik juga membangun pemahaman terhadap isu-isu sosial dan politik, yang memungkinkan Gen Z untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan wawasan yang lebih luas dan berbasis fakta. Dengan dasar pendidikan yang kuat, mereka lebih sadar akan etika dan tanggung jawab dalam berpendapat, yang berkontribusi pada terciptanya diskusi yang lebih produktif dan positif di platform media sosial.
--	--

Lampiran 2. Wawancara Dengan Generasi Z Mahasiswa Universitas Duta Bangsa

Nama : Bachrul Rizal Fauzi
NIM : 21010309
Jurusan : S1 Teknik Informatika
Universitas : Universitas Duta Bangsa
Usia : 21 Tahun
Hari : Senin 7 Oktober 2024

Nama		Transkrip
Zafira Zahra	:	Sejauh mana Anda mengetahui tentang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres/cawapres?
Bachrul Rizal	:	Saya mengetahui bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden, memperbolehkan kandidat di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri jika pernah menjabat sebagai kepala daerah atau gubernur/walikota.
Zafira Zahra	:	Apa yang memotivasi Anda untuk terlibat dalam diskusi politik di Instagram terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia capres/cawapres?
Bachrul Rizal	:	Saya merasa penting untuk menyuarakan pendapat saya dan berdiskusi dengan orang lain untuk memperluas perspektif dan menemukan solusi bersama. Kesadaran bahwa diskusi ini dapat mempengaruhi keputusan politik di masa depan juga mendorong saya untuk berpartisipasi aktif.
Zafira Zahra	:	Bagaimana pandangan Anda terhadap batasan usia capres/cawapres sebelum dan setelah keputusan MK ini? Apakah menurut Anda usia yang lebih muda membawa dampak positif atau negatif?
Bachrul Rizal	:	Saya tidak setuju dengan batasan usia capres/cawapres yang lebih muda setelah keputusan MK ini. Meskipun ada potensi untuk ide-ide segar, usia yang lebih muda sering kali kurang berpengalaman dalam menghadapi

		tantangan politik yang kompleks. Pengalaman dan kedewasaan sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar pada masyarakat.
Zafira Zahra	:	Seberapa penting menurut Anda, kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan tidak valid dalam membentuk pandangan politik Gen Z di Instagram?
Bachrul Rizal	:	Kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan tidak valid sangat penting dalam membentuk pandangan politik Gen Z di Instagram. Di era di mana informasi mudah diakses dan sering kali menyesatkan, keterampilan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam hoaks atau disinformasi. Dengan memahami cara mengevaluasi sumber dan konten, Gen Z dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan kritis mengenai isu politik. Hal ini juga membantu mereka terlibat dalam diskusi yang konstruktif dan mendukung perkembangan kesadaran politik yang lebih baik di kalangan generasi mereka.
Zafira Zahra		Sejauh mana Anda percaya bahwa pengaruh influencer di Instagram dapat berkontribusi pada perubahan kebijakan politik di masa depan?
Bachrul Rizal		Saya percaya bahwa pengaruh influencer di Instagram dapat berkontribusi secara signifikan pada perubahan kebijakan politik di masa depan. Influencer memiliki kemampuan untuk mencapai audiens yang luas, terutama di kalangan Gen Z dan milenial, yang merupakan kelompok demografis yang semakin aktif dalam politik. Ketika influencer membahas isu-isu politik atau kebijakan, mereka dapat menggerakkan opini publik, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi politik di kalangan pengikutnya. Dukungan influencer terhadap gerakan atau kampanye tertentu dapat memicu perbincangan luas di media sosial, yang pada akhirnya bisa memengaruhi pembuat kebijakan untuk merespons tuntutan publik. Namun, efektivitasnya

	juga bergantung pada kredibilitas influencer dan kualitas informasi yang mereka bagikan.
Zafira Zahra	Apakah Anda merasa bahwa respon cepat di media sosial, seperti komentar atau postingan tentang putusan ini, mempengaruhi pandangan orang lain mengenai masalah ini?
Bachrul Rizal	Sebagai seorang mahasiswa, saya percaya bahwa respon cepat di media sosial, seperti komentar atau postingan tentang putusan MK, memiliki pengaruh signifikan terhadap pandangan orang lain mengenai masalah ini. Media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi platform utama bagi generasi muda untuk berinteraksi dan berbagi pendapat secara langsung dan instan. Ketika seseorang membagikan opini atau komentar tentang sebuah isu politik yang sedang hangat, seperti keputusan MK mengenai batasan usia capres/cawapres, itu dapat memengaruhi bagaimana orang lain melihat masalah tersebut. Penyebaran opini ini dapat menimbulkan pengaruh positif atau negatif, tergantung pada sudut pandang yang dibagikan. Misalnya, jika banyak orang setuju dengan keputusan tersebut, maka mereka akan saling memperkuat pandangan mereka melalui komentar atau repost. Sebaliknya, jika ada yang tidak setuju, respon mereka bisa memicu debat yang lebih intens, sehingga mengundang lebih banyak orang untuk terlibat dan membentuk opini berdasarkan informasi atau pandangan yang mereka terima.

Lampiran 3. Wawancara Dengan Generasi Z Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

Nama : Eka Rosiana Wildaningtyas
NIM : 5402421006
Jurusan : S1 Pendidikan Tata Kecantikan
Universitas : Universitas Negeri Semarang
Usia : 21 Tahun
Hari : Rabu 9 Oktober 2024

Nama		Transkrip
Zafira Zahra	:	Sejauh mana Anda mengetahui tentang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres/cawapres?
Eka Rosiana	:	Yang saya ketahui tentang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres/cawapres mengizinkan calon di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri jika mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Zafira Zahra	:	Dari mana Anda mendapatkan informasi terkait keputusan ini? Apakah melalui media sosial, berita online, atau dari sumber lainnya?
Eka Rosiana	:	Saya mengetahui keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres/cawapres melalui beberapa unggahan di Instagram, yang muncul di beranda saya.
Zafira Zahra	:	Apakah Anda merasa keputusan ini relevan atau berpengaruh bagi masa depan politik Indonesia, terutama bagi generasi muda seperti Anda?
Eka Rosiana	:	Ya, saya merasa keputusan ini sangat relevan dan berpengaruh bagi masa depan politik Indonesia, terutama bagi generasi muda. Dengan adanya perubahan batas usia capres/cawapres, kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam kepemimpinan nasional menjadi lebih terbuka. Ini bisa mendorong keterwakilan politik yang lebih inklusif, mengingat banyak anak

		muda yang memiliki ide-ide segar dan visi untuk perubahan.
Zafira Zahra	:	Menurut Anda, bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan Gen Z dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid di Instagram, khususnya terkait keputusan-keputusan politik? Dan Seberapa pentingnya literasi digital dalam membantu Anda memahami keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia capres/cawapres?
Eka Rosiana	:	Cara paling efektif untuk meningkatkan kemampuan Gen Z dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid di Instagram adalah melalui pendidikan literasi digital yang lebih mendalam. Literasi digital sangat penting dalam membantu saya memahami keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia capres/cawapres. Dengan keterampilan literasi digital, saya dapat mengevaluasi sumber informasi yang saya temui di media sosial dan berita online, sehingga saya bisa membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid. Selain itu, literasi digital memungkinkan saya untuk menemukan berbagai perspektif dan analisis terkait keputusan tersebut, yang membantu saya membentuk pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap isu-isu politik yang relevan.
Zafira Zahra	:	Apakah Anda merasa bahwa jaringan politik di Instagram berfungsi sebagai ruang yang efektif untuk bertukar pandangan politik tentang isu-isu besar seperti batas usia capres/cawapres?
Eka Rosiana	:	Saya merasa bahwa jaringan politik di Instagram dapat berfungsi sebagai ruang yang efektif untuk bertukar pandangan politik tentang isu-isu besar, seperti batas usia capres/cawapres, tetapi dengan beberapa keterbatasan. Instagram sebagai platform visual memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan menarik, terutama melalui infografis, video pendek, dan konten yang mudah dicerna. Hal ini menjadikan Instagram sebagai tempat di mana Gen Z, yang merupakan

	generasi digital native, dapat dengan mudah mengakses dan berdiskusi tentang isu-isu politik yang sedang hangat dibicarakan.
--	--

Lampiran 4. Wawancara Dengan Generasi Z Mahasiswa Universitas Diponegoro

Nama : Saffana Fauziyatussoliha
 NIM : 21080121130076
 Jurusan : S1 Teknik Lingkungan
 Universitas : Universitas Diponegoro
 Usia : 21 Tahun
 Hari : 13 Oktober 2024

Nama		Transkrip
Zafira Zahra	:	Seberapa sering Anda terpapar informasi atau konten terkait keputusan MK di Instagram? Apakah frekuensi ini mempengaruhi pandangan Anda tentang keputusan tersebut?
Saffana	:	Saya cukup sering terpapar informasi dan konten terkait keputusan MK di Instagram, baik melalui postingan teman maupun akun media berita. Frekuensi paparan ini sangat mempengaruhi pandangan saya tentang keputusan tersebut, karena semakin banyak saya melihat berbagai sudut pandang, semakin saya bisa memahami konteks dan dampak dari keputusan itu. Dengan interaksi yang sering terjadi di platform, saya merasa lebih terlibat dan kritis terhadap isu-isu politik yang sedang dibahas.
Zafira Zahra	:	Dari mana Anda mendapatkan informasi terkait keputusan ini? Apakah melalui media sosial, berita online, atau dari sumber lainnya?
Saffana	:	Saya mengetahui keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres/cawapres melalui beberapa unggahan di Instagram, yang muncul di beranda saya dari akun media berita. Informasi pertama kali saya temukan melalui postingan infografis yang menjelaskan poin-poin utama dari keputusan tersebut, diikuti oleh diskusi di kolom komentar yang memberikan berbagai sudut pandang. Setelah melihatnya, saya melakukan

		pengecekan lebih lanjut di sumber berita resmi untuk memastikan keakuratan informasi.
Zafira Zahra	:	Bagaimana menurut Anda, apakah semakin banyak orang yang membicarakan keputusan ini di Instagram mempengaruhi Anda untuk ikut memberikan tanggapan? Mengapa?
Saffana	:	Menurut saya, semakin banyak orang yang membicarakan keputusan ini di Instagram mempengaruhi saya untuk ikut memberikan tanggapan. Diskusi yang ramai memberi saya dorongan untuk berpartisipasi, karena menunjukkan pentingnya isu tersebut. Keterlibatan orang lain juga menciptakan suasana inklusif, sehingga saya merasa lebih nyaman untuk berbagi pandangan saya.
Zafira Zahra	:	Bagaimana pandangan Anda terhadap batasan usia capres/cawapres sebelum dan setelah keputusan MK ini? Apakah menurut Anda usia yang lebih muda membawa dampak positif atau negatif?
Saffana	:	Sebelum keputusan MK, saya memiliki pandangan bahwa batasan usia capres/cawapres perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Namun, setelah keputusan tersebut, saya mulai melihat potensi positif dari usia yang lebih muda dalam kepemimpinan, seperti inovasi dan perspektif segar yang dapat mereka bawa. Meski demikian, ada juga kekhawatiran bahwa kurangnya pengalaman dapat menjadi kendala. Secara keseluruhan, saya percaya bahwa usia yang lebih muda bisa membawa dampak positif, asalkan didukung oleh kompetensi dan visi yang jelas.
Zafira Zahra		Seberapa sering Anda mendiskusikan keputusan MK ini dengan teman-teman Anda di Instagram atau platform media sosial lainnya? Bagaimana pengaruh diskusi tersebut terhadap pandangan Anda?
Saffana		Saya cukup sering mendiskusikan keputusan MK ini dengan teman-teman di Instagram, terutama setelah keputusan tersebut diumumkan. Diskusi ini membantu saya untuk memahami berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda, sehingga memperkaya pandangan saya tentang isu ini.

		Selain itu, interaksi dengan teman-teman juga membuat saya lebih kritis dalam menilai informasi yang saya terima dan memotivasi saya untuk lebih aktif dalam mengikuti perkembangan politik.
--	--	--

Lampiran 5. Wawancara Dengan Generasi Z Mahasiswa Universitas Gajah Mada

Nama : Zakiya Huridan Anggari

Jurusan : S1 Hukum

Universitas : Universitas Gajah Mada

Usia : 21 Tahun

Hari : 19 Oktober 2024

Nama		Transkrip
Zafira Zahra	:	Apakah Anda mengikuti influencer, selebriti, atau tokoh politik di Instagram yang membahas keputusan ini? Bagaimana pengaruh mereka terhadap pandangan Anda?
Zakiya Huridan	:	Saya mengikuti beberapa influencer, selebriti, dan tokoh politik di Instagram yang membahas keputusan ini. Pengaruh mereka cukup besar terhadap pandangan saya, terutama karena mereka sering memberikan perspektif yang berbeda atau mendalam tentang isu tersebut. Ketika mereka menjelaskan keputusan MK dengan sudut pandang yang relevan bagi generasi muda, saya jadi lebih memahami dampaknya dan lebih tertarik untuk terlibat dalam diskusi
Zafira Zahra	:	Bagaimana pandangan Anda terhadap batasan usia capres/cawapres sebelum dan setelah keputusan MK ini? Apakah menurut Anda usia yang lebih muda membawa dampak positif atau negatif?
Zakiya Huridan	:	Sebelum keputusan MK, saya berpandangan bahwa batasan usia capres/cawapres perlu diperhatikan untuk memastikan pengalaman yang cukup dalam kepemimpinan. Namun, setelah keputusan tersebut, saya mulai melihat potensi positif dari memperbolehkan usia yang lebih muda untuk mencalonkan diri. Meski begitu, ada juga risiko jika kandidat muda kurang pengalaman dalam mengelola tantangan politik. Secara keseluruhan, saya kurang percaya bahwa usia yang lebih muda dapat memberikan dampak positif

		asalkan diimbangi dengan komitmen dan kualitas kepemimpinan yang baik.
Zafira Zahra	:	Bagaimana cara Anda membedakan antara influencer yang serius membahas isu politik dengan mereka yang hanya ingin menarik perhatian?
Zakiya Huridan	:	Saya membedakan antara influencer yang serius membahas isu politik dengan mereka yang hanya ingin menarik perhatian melalui beberapa kriteria. Pertama, saya perhatikan konten yang mereka bagikan, influencer yang serius biasanya menyajikan informasi yang didukung oleh fakta, data, atau sumber yang kredibel. Kedua, saya melihat konsistensi mereka dalam membahas isu politik dan apakah mereka terlibat dalam diskusi yang mendalam. Terakhir, saya juga mempertimbangkan interaksi mereka dengan pengikut, seperti apakah mereka menjawab pertanyaan atau menanggapi kritik dengan cara yang konstruktif.
Zafira Zahra	:	Menurut Anda, bagaimana peran media sosial, khususnya Instagram, dalam membentuk diskursus politik di kalangan Gen Z? Apakah lebih banyak membangun diskusi atau justru menimbulkan polarisasi?
Zakiya Huridan	:	Menurut saya, media sosial, terutama Instagram, memainkan peran penting dalam membentuk diskursus politik di kalangan Gen Z. Di satu sisi, Instagram dapat membangun diskusi yang konstruktif dengan memungkinkan pengguna berbagi informasi dan pendapat. Namun, di sisi lain, platform ini juga berpotensi menimbulkan polarisasi, terutama ketika informasi yang disebarkan tidak akurat. Dengan demikian, peran Instagram tergantung pada bagaimana pengguna memanfaatkan platform, apakah untuk dialog terbuka atau memperparah perpecahan.
Zafira Zahra	:	Apa faktor yang memotivasi Anda untuk berkomentar atau berbagi pendapat mereka mengenai keputusan batasan usia ini di Instagram?

Zakiya Huridan	:	Faktor yang memotivasi saya untuk berkomentar atau berbagi pendapat mengenai keputusan batasan usia capres/cawapres di Instagram meliputi keinginan untuk terlibat dalam diskusi politik yang relevan dan penting bagi masa depan bangsa. Selain itu, saya merasa bahwa suara generasi muda perlu didengar, terutama dalam konteks isu yang berdampak langsung pada kami. Dukungan dari teman-teman di media sosial juga mendorong saya untuk berpartisipasi, karena diskusi yang terbuka dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama tentang isu-isu tersebut.
----------------	---	--

Lampiran 6. Wawancara Dengan Generasi Z

Nama : Hanggayu Aly
Usia : 25 Tahun
Pekerjaan : Direktur PT. Haza Semesta Daya
Hari : 19 Oktober 2024

Nama		Transkrip
Zafira Zahra	:	Dari mana Anda mendapatkan informasi terkait keputusan ini? Apakah melalui media sosial, berita online, atau dari sumber lainnya?
Hanggayu	:	Saya mendapatkan informasi terkait keputusan ini melalui Instagram, di mana banyak akun berita dan aktivis politik membagikan diskusi tentang topik tersebut.
Zafira Zahra	:	Seberapa sering Anda terpapar informasi atau konten terkait keputusan MK di Instagram? Apakah frekuensi ini mempengaruhi pandangan Anda tentang keputusan tersebut?
Hanggayu	:	Saya cukup sering terpapar informasi atau konten terkait keputusan MK di Instagram, terutama melalui unggahan dari akun berita, aktivis, dan diskusi di kolom komentar. Frekuensi ini memengaruhi pandangan saya karena semakin sering saya melihat konten tersebut, semakin banyak perspektif dan argumen yang saya temui. Hal ini membantu saya memahami isu lebih dalam dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membentuk opini yang lebih matang.
Zafira Zahra	:	Apakah Anda merasa keputusan ini relevan atau berpengaruh bagi masa depan politik Indonesia, terutama bagi generasi muda seperti Anda?
Hanggayu	:	Saya tidak setuju dengan keputusan ini karena ini berpengaruh besar bagi masa depan politik Indonesia, terutama bagi generasi muda. Usia bukanlah faktor utama yang menentukan kualitas kepemimpinan, melainkan pengalaman, kompetensi, dan visi politik yang jelas. Meski memberi peluang kepada calon yang lebih muda, perubahan batas usia ini tidak secara otomatis

		menjamin perwakilan atau kepentingan generasi muda akan lebih terakomodasi dalam politik nasional.
Zafira Zahra	:	Bagaimana pandangan Anda mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres/cawapres, dan apakah hal ini mempengaruhi niat Anda untuk berpartisipasi dalam pemilu kemarin?
Hanggayu	:	Keputusan ini menunjukkan bahwa anak muda dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional. Meskipun keputusan ini menarik perhatian saya, niat saya untuk berpartisipasi dalam pemilu kemarin lebih dipengaruhi oleh keyakinan akan pentingnya memilih, bukan hanya karena keputusan ini.
Zafira Zahra	:	Bagaimana cara Anda biasanya mengekspresikan pandangan politik Anda di Instagram, misalnya melalui postingan, story, atau komentar?
Hanggayu	:	Saya biasanya mengekspresikan pandangan politik saya di Instagram melalui komentar. Kolom komentar saya bisa berdiskusi langsung dengan pengguna lain. Kadang-kadang, saya juga ikut serta dalam polling atau berbagi repost dari akun-akun yang membahas isu politik secara mendalam.

Lampiran 7 Dokumentasi dengan Mahasiswa Universitas Tidar

No	Dokumentasi	Keterangan
1		Foto bersama Enggar Adi selaku Mahasiswa Universitas Tidar

Lampiran 8 Dokumentasi dengan Mahasiswa Universitas Duta Bangsa

No	Dokumentasi	Keterangan
1		Foto bersama Bachrul Rizal selaku Mahasiswa Universitas Duta Bangsa

Lampiran 9 Dokumentasi dengan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

No	Dokumentasi	Keterangan
1	 	Foto bersama Eka Rosiana selaku Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

Lampiran 10 Dokumentasi dengan Mahasiswa Universitas Diponegoro

No	Dokumentasi	Keterangan
1	 	Foto bersama Saffana selaku Mahasiswa Universitas Diponegoro

Lampiran 11 Dokumentasi dengan Mahasiswa Universitas Gajah Mada

No	Dokumentasi	Keterangan
1		Foto bersama Zakiya Huridan selaku Mahasiswa Universitas Gajah Mada

Lampiran 12 Dokumentasi dengan Generasi Z

No	Dokumentasi	Keterangan
1		Foto bersama Hanggayu Aly selaku Direktur PT. Haza Semesta Daya